

**PEMANFAATAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN**



**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelas Magister Humaniora**

**Disusun oleh :  
R. ANTON SUYATNO  
NIM. B4A. 099 019**

**Pembimbing  
Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

**PEMANFAATAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI UPAYA  
MENCEGAH KEPAILITAN**

**T E S I S**

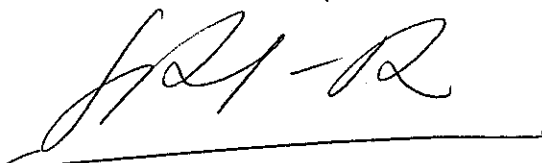
Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : .....

Disusun oleh :  
**R. ANTON SUYATNO**  
NIM : B4A. 099 019

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, S.H  
NIP. 130. 368. 053

Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H  
NIP. 130. 350. 519

## KATA PENGANTAR

### *Plan or Die !*

Judul buku yang ditulis oleh Timothy Nolan, Leonard Goodster dan J. William Pfeiffer diatas adalah merupakan peringatan kepada para pengurus organisasi apapun namanya, baik privat maupun publik untuk segera melakukan perencanaan masa depan organisasinya. Sebab apabila tidak melakukan, maka organisasi yang dipimpinannya akan terhempas oleh cepat dan dramatisnya perubahan.

Peringatan seperti itu tentu juga sangat relevan untuk ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena krisis ekonomi yang terjadi demikian cepat, sehingga mengakibatkan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya (*enable to pay*) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Perusahaan-perusahaan ini harus segera melakukan negoisasi untuk merestrukturisasi utang-utangnya dan apabila tidak berhasil, maka dapat mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga. Sebab kalau tidak, maka para krediturnya akan mengajukan perusahaan-perusahaan tersebut untuk dipailitkan.

Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa penulis tertarik melakukan penelitian tentang manfaat PKPU dalam mencegah kepailitan. Pertama, karena dengan terjadinya krisis ekonomi banyak sekali perusahaan yang dahulunya berjaya, tiba-tiba diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses kepailitan. Kedua, karena PKPU merupakan satu-satunya cara bagi perusahaan untuk mencegah kepailitan setelah gagal melakukan negoisasi dalam merestrukturisasi utang-utangnya. Dua alasan tersebut memberikan penjelasan betapa pentingnya PKPU dalam menjaga stamina pembangunan ekonomi bangsa. Mengingat perusahaan-perusahaan itu sesungguhnya adalah energi dalam pembangunan nasional.

Selain itu, sebagai abdi negara, penulis juga merasa terpanggil untuk turut mencegah terjadinya kemerosotan pembangunan ekonomi dengan menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang terancam kepailitan, khususnya dari sisi hukum.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum (Mhum) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, maka penulis menetapkan Tesis ini dengan judul **“PEMANFAATAN**

## **PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN.”**

Untuk itu dengan selesainya penulisan Tesis ini, penulis memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa. Sebab hanya atas karunia, rahmat dan kuasa-Nya saja semua perbuatan itu dapat dilakukan oleh hambanya.

Kepada Yang Amat Terpelajar Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., ijinkanlah penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, yang telah berkenaan membimbing dan memberikan persetujuan atas penulisan Tesis ini. Karena itu penulis menyampaikan doa agar kebbaikannya selama ini dapat dilimpahkan oleh Allah Yang Maha Pengasih.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Muladi, S.H., Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I (1998-1999), yang dengan ikhlas telah merancang program dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

2. Yang Amat Terpelajar Bapak Barda Nawawi Arief, SH., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Beliau yang banyak memberikan bekal sebagai seorang yuris se-yogyanya berpegang pada pandangan Paul Scholten, “Indire recht beslissing van en yurist is een gewitens beslissing”;
3. Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Rony Hanitijo Soemitro, Dosen dan Penulis Buku Metode Penelitian Hukum;
4. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya selama perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak dan Ibu Pejabat di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan selama penulis menempuh kuliah;
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang telah memberikan ijin dan dukungan untuk mengikuti kuliah.

Kepada sahabat-sahabat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Kerjasama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk terus mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan Tesis ini,

didalam kesibukan kerja yang luas biasa, yang menuntut pelayanan prima penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

Untuk isteri tercinta Hajah Tati Sumiyati dan anak-anakku Dyah Eka Puspitasari dan Dwi Anandita Hariwibowo yang selalu membantu dengan penuh pengertian dan kasih sayang, yang tentunya telah menyatu dalam mata rantai kehidupan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan syukur yang mendalam bahwa hingga selesainya penulis tesis ini, masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, namun telah membantu penulis didalam menyelesaikan tesis ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih. Semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah Yang Maha Pengasih.

Tentu 'tiada gading yang tak retak,' demikian pula dengan penulisan tesis ini. Banyaknya kekurangan pasti dapat ditemukan, walau penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisannya. Hal itu adalah menjadi tanggung jawab penulis secara pribadi, terlepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah disebutkan diatas.

Akhirnya, penulis hanya dapat berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, dan dapat dianggap sebagai wujud kepedulian terhadap kemajuan dunia ilmu dan pengetahuan dibidang Hukum.

Semarang,

Penulis

**R. ANTON SUYATNO, S.H.**



## ABSTRACT

The first of economic growth in the new order era, in fact, had made society forgot about the existence of *Faillsement Verordening* of Bankruptcy Law was issued in 1905. However, since monetary and economic crisis was happened in the middle of 1997, which was coming up some difficulties in business sector, had caused bankruptcy matters become more popular back until its top level where it was decelerated the new Bankruptcy Law which is so-called Law No. 4 Year 1998 concerning Government Regulation Decree No. 1 Year 1998 concerning the Amendment of Bankruptcy Law.

The Bankruptcy Law is being hope to be a new legal device that regulate matter of debtor fulfillment obligation to their creditors. Thus, in any condition of liquidity difficulties, e debtor as could as possible not to lose his creditors. Besides that, this law give also the facility to debtor for apply PKPU (Penundaan Pembayaran Utang / the Suspension of Debt Payment Obligation) application as one of alternative ways to avoid Bankruptcy.

The PKPU is definitely very useful in order to keep sustainable of debtor's life and it will be affected to national economic growth. In order to use those settlement, as a matter of fact, Judges should really consider the debtor's prospect by minimize the losses of their creditor. Although for declaring such a verdict, Judges have to have agreements from the creditors quorum.

The case above is absolutely become more and more interesting to be research so that it could be found the answer for the question how to save a company from Bankruptcy in relation with win-win solution for debtor and creditor.

Nowadays, under the circumstances there are only two optional choices, the first is to change several settlements in Bankruptcy Law. Next, the Judges in giving a verdict is unspecialized base on Bankruptcy Law only since in principally every court decision is always followed by the sentence **"JUSTICE FORSAKEN UNDER A NAME OF GOD THE ALMIGHTY."**

## RINGKASAN

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di era Orde Baru ternyata telah menjadikan masyarakat lupa atas keberadaan *Faillissements Verordening* atau Undang-undang Kepailitan yang diundangkan pada tahun 1905. Namun sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi pada pertengahan tahun 1997, yang menimbulkan berbagai kesulitan dalam dunia usaha menyebabkan masalah kepailitan kembali populer, hingga puncaknya ditetapkan Undang-undang Kepailitan baru, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan.

Undang-undang Kepailitan ini diharapkan menjadi sarana hukum baru yang mengatur soal pemenuhan kewajiban debitur kepada para krediturnya. Sehingga dalam kondisi kesulitan likuiditas, debitur sedapat mungkin tidak merugikan para krediturnya. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan fasilitas kepada debitur untuk mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagai salah satu alternatif jalan dalam mencegah kepailitan.

PKPU tersebut sudah barang tentu sangat bermanfaat dalam menjaga kelangsungan hidup debitur dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu dalam menggunakan ketentuan tersebut, Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan prospek debitur dengan meminimalisir kerugian para krediturnya. Meskipun untuk menetapkan putusan seperti itu, Majelis Hakim harus memperoleh persetujuan secara korum dari pada kreditur.

Persoalan diatas tentu menjadi menarik untuk diteliti. Sehingga dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana menyelamatkan perusahaan dari kepailitan dalam hubungan debitur dan kreditur yang *win-win solution*.

Dalam keadaan sekarang hanya dua pilihan, yaitu, pertama, mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan. Kedua, Majelis Hakim dalam menetapkan putusan tidak khusus berdasar pada Undang-undang Kepailitan, karena pada hakekatnya setiap pengadilan selalu diawali dengan kata-kata **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRACT .....	ix
RINGKASAN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
 BAB I    PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Kerangka Berfikir .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	22
E. Kontribusi Penelitian .....	23
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	29
 BAB II    TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMANFAATAN PKPU SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN .....	  32
A. Lembaga Kepailitan Dan PKPU Pada Umumnya .....	32
1. Sejarah Lahirnya Lembaga Kepailitan di Indonesia .....	32
2. Tujuan Dan arti Pentingnya Lembaga Kepailitan Dalam Dunia Usaha .....	43
3. Utang-Piutang Dalam Dunia Usaha .....	45
4. Pengaturan Lembaga Kepailitan Pada Umumnya .....	56
a. Tentang Permohonan Kepailitan .....	57
b. Proses Pemeriksaan Permohonan Kepailitan .....	59
c. Upaya Hukum Dalam Kepailitan .....	60
d. Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur Yang Merugikan Kreditur .....	64
e. Hak Eksekusi Kreditur Preferan Dan Hak Pihak Ketiga Atas Harta Yang Ada Pada Debitur Pailit .....	70
f. Pengadilan Niaga .....	72
g. Kurator Dalam hal Pailit .....	75

B.	Lembaga PKPU dan Penyelesaian Utang .....	76
1.	Tentang Kepailitan .....	76
a.	Pengertian .....	76
b.	Pernyataan Pailit .....	77
c.	Akibat Pernyataan Pailit Bagi Kreditur .....	79
d.	Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitur .....	80
2.	Penyelesaian Utang-Piutang Melalui PKPU .....	84
a.	Pengertian .....	84
b.	Persyatan Permohonan PKPU .....	87
c.	Akibat Dikabulkannya Permohonan PKPU .....	88
C.	Manfaat PKPU Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan .....	97
1.	Manfaat Dilihat Dari Sisi Ekonomi .....	97
2.	Manfaat Dilihat Dari Sisi Sosial .....	98
3.	Manfaat Dilihat Dari Sisi Yuridis .....	99
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	101
A.	Hasil Penelitian .....	101
1.	Alasan debitur mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan .....	101
a.	Sebagai upaya mencegah kepailitan .....	101
b.	Debitur tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha .....	112
c.	Manfaat Waktu, Ekonomis Dan Yuridis .....	114
2.	Tingkat Keberhasilan Debitur Mencegah Kepailitan Melalui Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	116
a.	Debitor terhindar dari kepailitan sebagai akibat dari tercapainya perjanjian di bawah tangan .....	116
b.	Debitor terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhinya perjanjian perdamaian .....	120
c.	Debitor pailit sebagai akibat gagal tercapainya perjanjian perdamaian .....	124
d.	Debitor pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian .....	128
3.	Efektivitas PKPU Dalam Mencegah Kepailitan .....	136
a.	Substansi (isi) Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU .....	136
b.	Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian .....	165

B. Pembahasan .....	167
1. Alasan debitur mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah Kepailitan .....	168
a. Sebagai upaya mencegah kepailitan .....	168
b. Debitur tetap dapat melakukan kegiatan usaha .....	179
c. Manfaat Waktu, Ekonomi Dan Yuridis .....	186
2. Tingkat keberhasilan debitur dalam mencegah kepailitan melalui pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) .....	196
a. Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat tercapainya perjanjian dibawah tangan .....	197
b. Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhinya perjanjian perdamaian .....	200
c. Debitur pailit sebagai akibat gagal tercapainya perjanjian perdamaian .....	203
d. Debitur pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian .....	203
3. Efektivitas PKPU dalam Mencegah Kepailitan .....	205
a. Substansi (isi) Perjanjian Perdamain Dalam PKPU .....	207
b. Pelaksanaan Perjanjian perdamaian .....	212
BAB IV PENUTUP .....	222
A. Kesimpulan .....	222
B. Saran .....	226

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perusahaan pada umumnya dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Untuk itu kehadiran perusahaan diharapkan dapat membuka lapangan dan mensejahterakan tenaga kerja, serta menyediakan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, kehadiran perusahaan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional baik itu melalui pembayaran pajak maupun tanggung jawab sosial lainnya.<sup>1</sup>

Namun kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut tidak semuanya memperoleh keuntungan dan memenuhi harapan seperti yang direncanakan. Bahkan banyak yang mengalami kerugian yang mengarah pada kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu melanjutkan usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi antara lain karena dalam menjalankan kegiatan usaha pengurus

---

<sup>1</sup>Tom Cannon, *Corporate Responsibility*, Pitman Publishing Co., London, 1992, hal. 39-42



perusahaan tidak memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan dalam memperoleh, mengelola dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dengan tepat. Selain itu juga karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menerapkan etika bisnis dengan baik.<sup>2</sup>

Sebaliknya apabila pengurus perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan menjalankan kepengurusannya dengan baik, maka perusahaan yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan dan mendapat kepercayaan dari pihak lain yang terkait, yaitu antara lain dari para pelanggan dan kreditur (-krediturnya).

Akan tetapi pada perusahaan yang pengurusnya tidak menjalankan tugas fiduciari-nya (*fiduciary duties*) sehingga tidak berbuat sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang dipimpinnya, maka akan dapat menyebabkan atau mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan yang tidak sehat. Misalnya, bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pinjaman dana yang sangat besar yang melebihi kemampuan perusahaan ke luar negeri, tetapi tidak untuk kepentingan perusahaannya saja.<sup>3</sup> Hal seperti ini ternyata telah

---

<sup>2</sup>Haidar Bagir, *Era Baru Manajemen Etis*, Mizan, Bandung, 1995, hal. 5-9

<sup>3</sup>*Fiduciary Duties* adalah tugas yang dibebankan kepada direktur dan komisaris perusahaan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang diurus dengan ukuran etis dan ekonomis yang tinggi. Lihat Munir Faudy, *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 179-180

menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu mengembalikan utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Akumulasi dari banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan serupa dalam hal yang tidak sehat tadi telah menyebabkan utang swasta menjadi lebih besar dari utang negara. Keadaan yang seperti itu terbukti pada gambaran keadaan pertengahan tahun 1997 dimana permintaan dolar untuk melunasi pinjaman luar negeri melonjak secara drastis.

Dalam hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*), apabila permintaan naik, maka nilai produk yang sama sementara tidak ada produk substitusinya, maka nilai produk tersebut akan naik.<sup>4</sup> Hukum ini juga berlaku terhadap permintaan dolar pada waktu itu, yaitu karena besarnya permintaan dolar dalam negeri, maka menyebabkan nilai tukar dolar terus meningkat sehingga mencapai 500% lebih di awal tahun 1998.

Dengan naiknya nilai tukar dolar atau jatuhnya nilai rupiah terhadap mata uang asing seperti itu telah mengakibatkan antara lain (a) menurunnya daya beli masyarakat; (b) menipisnya kepercayaan terhadap dunia usaha; (c) menurunnya laju pertumbuhan ekonomi yang mengarah kepada pertumbuhan yang negatif; dan (d) ketidakmampuan

---

<sup>4</sup>Budiono, Ekonomi Mikro, BPPE, Yogyakarta, 1993, hal. 63-78.

perusahaan-perusahaan (tidak saja yang melakukan peminjaman ke luar negeri, tetapi juga yang krediturnya di dalam negeri) untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat pada waktunya (*unable to pay*) atau bahkan tidak dapat lagi untuk membayar utangnya (*stop to pay*).<sup>5</sup>

Menyikapi akibat naiknya nilai dolar tersebut, para pengurus perusahaan terpaksa melakukan berbagai tindakan dalam rangka menyelamatkan perusahaan dan/atau aset-asetnya. Bagi perusahaan yang dalam prakiraan para pengurusnya akan dapat membayar utangnya, maka ia akan segera melakukan negoisasi kepada kreditur (atau para krediturnya) untuk dapat menunda dan menjadwalkan kembali pembayaran utangnya. Sementara, bagi perusahaan yang sudah tidak mungkin lagi membayar utangnya (*stop to pay*), maka ia tinggal menunggu nasib dari kreditur (-krediturnya) atau menjalankan pembubaran perusahaan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dilakukan atas usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam rangka mendukung upaya para pengusaha tersebut dan agar perekonomian nasional dapat bangkit kembali, maka pemerintah

---

<sup>5</sup>Hasil Seminar Universitas Indonesia, *Membangun Indonesia Baru*, 1998

bersama dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya melakukan reformasi disegala bidang kehidupan, termasuk dibidang hukum. Dimana salah satu aspek yang penting dalam reformasi dibidang hukum tersebut adalah dengan diundangkannya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 Tahun 1998, pada tanggal 22 April 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian telah ditetapkan kembali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan.

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut telah mengubah dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kepailitan yang terdahulu, yaitu *Faillissements Verordening* (*Staatsblad*, Tahun 1905 Nomor 217 *jo* *Staatsblad*, Tahun 1906 Nomor 348), serta menambah Bab baru, yaitu Bab Ketiga tentang Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) ini berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perubahan, penambahan dan penyempurnaan dilakukan karena disamping peraturan kepailitan yang masih berlaku pada waktu itu adalah warisan dari perundang-undangan kolonial -- sudah tidak dengan keadaan, juga untuk memberikan

kepastian hukum dalam penyelesaian utang, khususnya yang menyangkut dengan kreditur asing.<sup>6</sup>

Sebagai perangkat hukum, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang merupakan penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 memberikan 2 (dua) alternatif kepada perusahaan (debitur) yang tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo, yaitu dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Lebih lanjut dalam undang-undang kedua alternatif tersebut diatur sebagai berikut :

1. Debitur dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan apabila mempunyai dua atau lebih kreditur tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. (vide pasal 1 ayat (1)). Dimana putusan pailit tersebut dapat dimohonkan oleh debitur sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih kreditnya. Selain itu, permohonan pailit dapat juga dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, yaitu :<sup>7</sup>

1.1. Kejaksaan, untuk kepentingan umum;

1.2. Bank Indonesia, untuk debitur yang merupakan bank ; dan

---

<sup>6</sup>Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hal. 1-5

<sup>7</sup>*Ibid.* hal. 13-16

- 1.3. Badan Pengawas Pasar Modal, untuk debitur yang merupakan perusahaan efek.
2. Debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (vide Pasal 212). Atau dapat pula dilakukan sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya (Pasal 217 ayat (6)).

Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasehat hukum-nya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak,<sup>8</sup> baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya juga disebut PKPU)

---

<sup>8</sup>Diminick Salvatore, *Managerial Economics in A Global Economy*, McGraw Hill, Inc., New York, hal. 8-11.

ditempatkan pada *ranking* pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan 'sementara' kewajiban pembayaran utang. (vide Pasal 214 ayat (2)).

Searah dengan upaya untuk memberikan perlindungan hukum debitur terhadap tuntutan kepailitan itu, maka pada Pasal 217 ayat (6) diatur tentang kedudukan yang lebih dipentingkan terhadap permohonan PKPU daripada permohonan pernyataan pailit. Dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Merujuk pada uraian di atas maka lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dimanfaatkan sebagai sarana/alat hukum bagi debitur untuk menjadwalkan kembali penyelesaian utangnya sekaligus mencegah kepailitan. Dalam hal ini undang-undang memberikan tempo waktu 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara pembayaran utang ditetapkan.

Didalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) maka debitur tidak

kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus harta, asalkan hal seperti itu dilakukan bersama-sama dengan pengurus. Kedudukan debitur seperti itu dilakukan bersama-sama dengan pengurus. Kedudukan debitur seperti ini tentunya dapat memberikan keuntungan baik dari pihak debitur maupun kreditur (para kreditur). Bagi debitur akan membuka kesempatan (*option*) untuk memperbaiki dan mengatasi kesulitan likuiditasnya, sehingga usahanya dapat dipertahankan dan membayar utang-utangnya. Sedang bagi kreditur, adanya penundaan kewajiban pembayaran utang akan terbuka kemungkinan utang-utangnya dapat dilunasi secara penuh.

Mencermati keuntungan dari lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang yang lebih efektif dalam penyelesaian utang dibandingkan dengan lembaga kepailitan, maka penulis terdorong untuk meneliti lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, khususnya pemanfaatan oleh para pelaku ekonomi yang sedang mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo.

## **B. Perumusan Masalah**

Mengingat luasnya masalah kepailitan pada umumnya, maka pada penelitian ini hanya dibatasi pada pemanfaatan lembaga



penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh debitur yang berwujud Perseroan Terbatas. Meskipun demikian, pembatasan ini tidak akan mengurangi arti penting dari penelitian ini, mengingat permasalahan ini sangat penting dalam penyelesaian utang dengan *win-win solution* dan sebagai solusi dalam menyelamatkan perusahaan dari ancaman kepailitan sehingga permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengapa debitur memilih Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menghadapi proses kepailitan ?
- b. Bagaimana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat mencegah kepailitan ?
- c. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendorong keberhasilan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga debitur terhindar dari kepailitan ?

### **C. Kerangka Berpikir**

#### **C.1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pada hakekatnya setiap utang harus dibayar. Terhadap utang yang telah jatuh tempo maka pelaksanaannya (eksekusinya) dapat dilakukan atas permohonan para kreditur melalui prosedur kepailitan. Jika debitur tidak mampu membayar utangnya (*unable to pay*), maka

debitur dapat dinyatakan pailit dengan tujuan dilakukan pemberesan atas harta (budel pailit). Keadaan demikian tidak selalu efektif, sedangkan apabila debitur diberi waktu, maka besar harapan debitur akan dapat melunasi utang-utangnya. Dalam putusan pengadilan debitur akan diberi kesempatan untuk menunda (merestruktisasi) pembayaran utangnya hingga batas waktu yang ditentukan secara limitatif, dan atas putusan tersebut para pihak tidak diberi hak untuk mengajukan banding. Jadi lembaga kepailitan merupakan benteng terakhir setelah upaya-upaya yang ditempuh tidak memperoleh hasil.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, telah diatur salah satu instrumen hukum yang berhubungan dengan kepailitan, yaitu lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ada 3 (tiga) ciri utama dari penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, yaitu :<sup>9</sup>

- 1.1. Adanya lembaga penangguhan seperti dimaksud dalam Pasal 56A Undang-undang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 (selanjutnya disebut

---

<sup>9</sup>*Op.cit.*, Sudargo Gautama, hal. 17-56

Undang-undang tentang Kepailitan) yang juga diberlakukan pada penundaan kewajiban pembayaran utang.

- 1.2. Adanya ketentuan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang pasti seperti dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4).
- 1.3. Dihapuskannya upaya-upaya banding bila pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur konkuren seperti dimaksud dalam Pasal 217A ayat (1).

Merujuk pada ciri-ciri di atas maka penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur berdasarkan putusan pengadilan diberikan waktu (tempo) yang pasti untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur. Didalam waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus harta kekayaannya. Hal ini berbeda sifatnya dengan kepailitan, dimana debitur kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus harta kekayaannya. Jadi jika ditinjau dari sifatnya, maka dalam penundaan kewajiban pembayaran utang lebih ringan dibandingkan dengan kepailitan. Karena dalam penundaan kewajiban pembayaran utang debitur tetap berwenang melakukan perbuatan pengalihan dan

pengurusan harta kekayaannya asalkan hal itu dilakukan bersama-sama dengan pengurus.

Namun demikian tidak semua permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan. Permohonan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu, yaitu :

1. Penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh debitur. Permohonan tersebut dapat dilakukan oleh debitur atas prakarsanya sendiri (Pasal 212 Undang-undang tentang kepailitan) atau dapat pula dilakukan sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh sedikitnya 2 (dua) krediturnya (Pasal 217 ayat (6)).
2. Dalam hal permohonan dilakukan sebagai reaksi atas permohonan pernyataan pailit, maka perlu diperhatikan bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian “diperiksa pada saat yang bersamaan” dalam Pasal 217 ayat (6) berarti bahwa kedua permohonan tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Niaga.
3. Penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang tentang

Kepailitan beserta surat-surat bukti selayaknya. Surat-surat tersebut perlu dan agar dari surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitur dikemudian hari dapat memuaskan kreditur-krediturnya.

Disamping persyaratan-persyaratan di atas, untuk memberikan jaminan bahwa (para) kreditur akan menerima pelunasan utang-utangnya, maka setelah menerima surat permohonan Pengadilan Niaga segera mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang “sementara” dan menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat seorang atau lebih pengurus. Dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitur berada di bawah pengawasan pengurus. Tanpa persetujuan dan ikut sertanya pengurus, debitur terhitung sejak tanggal dimulainya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang tidak berwenang melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan kekayaannya (Pasal 226 ayat (1)).

Untuk menetapkan apakah kepada debitur akan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap harus diadakan persidangan yang merupakan rapat “permusyawaratan” hakim paling lambat hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan sementara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Adapun

jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang “secara tetap” tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang ditetapkan.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa bila waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan (Pasal 217A ayat (1)), maka Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari sesudah terjadinya peristiwa itu. Terhadap pernyataan (putusan) Pengadilan Niaga tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali (Pasal 275). Sedangkan apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dikabulkan, maka berlaku penangguhan hak eksekusi kreditur yang tagihannya dijamin dengan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1). Jangka waktu tersebut dapat berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan oleh Pengadilan. Keberadaan lembaga

penangguhan (penundaan kewajiban pembayaran utang) tersebut dimaksudkan selain untuk mencegah agar pembayaran-pembayaran utang tidak sia-sia, hal mana mudah terjadi seandainya kreditur separatis dapat mengeksekusi hak-hak mereka sebagaimana hal itu dimungkinkan dalam Undang-undang Kepailitan yang lama, juga untuk mencegah terjadinya kepailitan seandainya dalam waktu (tempo) penundaan kewajiban pembayaran utang debitur dapat menyelesaikan utang-utangnya.

## C.2. Asumsi-asumsi

Permasalahan pokok yang hendak dipecahkan didalam penelitian ini adalah hubungan antara “Pemanfaatan Lembaga Penundaan Kewajiban pembayaran Utang” akan memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan “Penyelesaian Utang” secara penuh. Pilihan atas asumsi dasar yang seperti itu didasarkan pada pandangan bahwa persetujuan kreditur (para kreditur) hanya akan diberikan kepada debitur untuk menjadwalkan kembali utang-utangnya yang telah jatuh tempo, apabila terbuka kemungkinan bahwa utang-utang tersebut akan dilunasi secara penuh. Oleh sebab itu konsep berpikir yang digunakan dalam penelitian ini akan berkisar pada dua hal, yaitu konsep

“penyelesaian perkara yang menguntungkan para pihak” (*win-win solution*) dan konsep-konsep tentang “perbaikan keuangan dan manajemen perusahaan” sebagai upaya untuk menyelamatkan debitur yang tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo (*insolvenncy*). Berikut ini adalah uraian tentang konsep-konsep tersebut :

## 2.1. Penyelesaian yang Menguntungkan Para Pihak

Untuk dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang maka debitur wajib melampirkan rencana perdamaian. Rencana perdamaian tersebut harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada Hakim Pengawas, dan Pengurus serta ahli (bila ada). Hal ini dikandung maksud agar etiket baik debitur untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat diketahui oleh umum, khususnya para krediturnya untuk mendapat persetujuan atau ditolak. Meminjam istilah Mariam Darus Badruzaman tentang asas-asas dalam kebebasan berkontrak, maka rencana perdamaian itu merupakan bukti-bukti yang secara transparan dapat diperiksa dan diuji secara terbuka untuk dijadikan dasar bagi para pihak (debitur dan kreditur) untuk “berkontrak”



menjadwalkan kembali waktu pembayaran utang atau penundaan kewajiban pembayaran utangnya. Adapun asas-asas dimaksud (selain asas-asas dalam hukum perjanjian) adalah :<sup>10</sup>

- a. Asas konsensualisme, yaitu asas yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya untuk menciptakan perjanjian.
- b. Asas kepercayaan, yaitu asas yang menghendaki agar yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
- c. Asas kekuatan mengikat, yaitu asas yang dapat mengikat para pihak pada apa yang diperjanjian sepanjang yang dikehendaki.
- d. Asas persamaan hak, yaitu asas yang menempatkan para pihak dalam persamaan derajat.
- e. Asas keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki kesetaraan antara debitur, disini kreditur mempunyai kekuatan untuk menentuk pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun

---

<sup>10</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal.42-43

ia juga diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian itu dengan etiket baik.

- f. Asas moral, yaitu asas yang menghendaki bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara wajar dari perbuatan yang dilakukan secara suka-rela dari para pihak. Faktor yang memberikan motivasi pada bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah bersarkan moral.
- g. Asas kepatutan, yaitu asas yang menghendaki bahwa ketentuan dalam isi perjanjian memiliki rasa adil bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
- h. Asas kebiasaan, yaitu asas yang menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya memikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja, tetapi juga memikat pula terhadap hal-hal yang menjadi kebiasaan yang yang diikuti. Asas ini juga diatur dalam Pasal 1339 KUH-Perdata.
- i. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang menghendaki bahwa karena perjanjian sebagai suatu figur hukum maka harus mengandung kepastian huku. Kepastian ini menjadikan kekuatan yang memikat yang menjadikan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sejalan dengan asas-asas diatas, kehadiran Undang-undang tentang Kepailitan juga dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain antara debitur dengan kreditur, sehingga saling menguntungkan. Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum di masyarakat memang untuk mengatur lalu-lintas kepentingan. Karena apabila ingin memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, maka kepentingan lain harus dibatasi dengan suatu hukum.

Oleh karena itu apabila asas-asas tersebut dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang kepailitan dapat dipenuhi, maka seharusnya tidak ada alasan bagi kreditur untuk tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, agar dalam penyelesaian utangnya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat menguntungkan para pihak (*win-win solution*).

## **2.2. Perbaikan Keuangan dan Manajemen Perusahaan**

Meskipun konsep *win-win solution* menjadi acuan dasar dalam penyelesaian utang, perlindungan debitur dari ancaman

---

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53-57

kepailitan adalah sangat penting. Sebab dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak pihak yang terlibat, yaitu kepentingan *stake holders* dari debitur yang dinyatakan pailit dan kepentingan negara. Karena itu perusahaan yang terancam kepailitan dapat memanfaatkan lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang atas inisiatif atau sebagai reaksi atas permohonan pailit dari krediturnya.

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur dengan diberi kesempatan melakukan “perbaikan keuangan dan manajemen” untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, baik itu melalui penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporete reorganization*), baik itu melalui penggantian pengurus (direksi/manager) perusahaan maupun memfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan itu diberikan kepada debitur setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya.

Dengan demikian perbaikan keuangan dan manajemen (*solvable*) merupakan hal yang juga harus dilaksanakan apabila

debitur telah mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, agar tempo untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Memahami dan menginvestarisasi latar belakang para pengusaha memilih lembaga penundaan kewajiban utang sebagai alternatif penyelesaian utang di samping proses kepailitan.
2. Menentukan seberapa besar kegunaan ketentuan-ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam melindungi perusahaan dari tuntutan kepailitan.
3. Menemukan kelemahan pada ketentuan-ketentuan tersebut dalam mencegah kepailitan dan mengetahui seberapa jauh aspek ekonomi menjadi pertimbangan para Hakim Pengadilan Niaga dalam menetapkan putusan.

### E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan hukum kepailitan “penundaan kewajiban pembayaran utang.”
2. Secara praktis, yaitu :
  - a. Memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi mengapa memilih lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang daripada upaya hukum lainnya dan gambaran yang mendalam tentang lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang ;
  - b. Memberikan masukan kepada para praktisi dalam mengimplementasikan Undang-undang Kepailitan, khususnya dalam praktek peradilan pada Pengadilan Niaga;
  - c. Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai kepailitan (*bankruptcy*) atau isolvensi (*isolvency*), terutama yang berkaitan dengan penundaan pembayaran utang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian mengenai suatu pelaksanaan undang-undang yang mengatur kepailitan, khususnya penundaan kewajiban pembayaran utang oleh para pelaku ekonomi.

### **1. Metode Pendekatan**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan hukum ekonomi. Karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*), oleh karena situasi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini maka orientasi ekonomipun selalu berubah-ubah. Namun mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah pemanfaatan lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai sarana hukum untuk mencegah kepailitan, maka pendekatannya terutama ditempuh melalui pendekatan yuridis-empiris. Selain itu, untuk memberikan gambaran dan analisis yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikemukakan maka dalam penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini merupakan hukum empiris maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung terhadap para informan, seperti pelaku ekonomi dan pakar serta pihak yang terkait dalam proses penetapan putusan mengenai kepailitan, antara lain debitur, Hakim Pengadilan Niaga dan Pengacara (Kurator). Selain itu menunjang kelengkapan penelitian juga dipergunakan data sekunder, yaitu berupa buku-buku dan jurnal hukum ekonomi yang relevan, peraturan perundang-undangan dan himpunan putusan Hakim Pengadilan Niaga.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Inventarisasi hukum positif yang berhubungan dengan kepailitan. Pada tahap ini sekaligus dilakukan koleksi, identifikasi dan klasifikasi dari berbagai peraturan yang berhubungan dengan kepailitan.



3.2. Tahap koleksi dan klasifikasi kasus kepailitan, terutama putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

- Putusan No.01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.01/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan No.03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.02/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan No.04/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.03/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan No.09/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.04/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan No.08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.05/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan No.17/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.06/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan No.20/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.07/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. (perkara kepailitan perorangan);
- Putusan No.22/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.08/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

- Putusan No.23/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.09/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan No.21/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo Putusan No.10/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

3.3. Wawancara terstruktur dengan informan, yaitu Debitur, Kreditur, Hakim dan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, Penasehat Hukum yang menangani perkara kepailitan serta pakar di bidang kepailitan.

3.4. Analisis data dilakukan dengan menggunakan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kepailitan maupun pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka.

#### **4. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai besar berupa kasus, yakni Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukumnya dan dilengkapi

dengan hasil wawancara dengan para informan. Seluruh data tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi sistematis-kualitatif. Sedang penganalisaan datanya dilakukan dengan secara deskriptif-preskitif.<sup>12</sup>

## 5. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain di luar data yang dimiliki untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang dimiliki tersebut.<sup>13</sup>

Dalam hal ini Denzim membagi 4 (empat) macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan yaitu melalui penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Namun dalam penelitian ini hanya akan berpegang pada triangulasi melalui penggunaan sumber, yakni membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode

---

<sup>12</sup>Surjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1996, hal 45-51. Baca juga Norma K.Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, SAGE Publication, London, 1994, hal. 465-469

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung, hal. 178.

kualitatif untuk memperoleh validitas data. Hal ini dapat dicapai melalui :<sup>14</sup>

- 4.1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 4.2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di muka umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
- 4.3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4.4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti orang awam, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang swasta (pelaku ekonomi dan penasihat hukum) dan orang pemerintahan (yudikatif dan eksekutif).
- 4.5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai karya ilmiah berupa tesis, yang terdiri dari 4 (empat) Bab. Untuk mendapatkan gambaran yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 179

lebih jelas maka pada tiap-tiap Bab tersebut akan dirinci lagi menjadi beberapa Sub-bab.

Bab I Adalah Bab Pendahuluan, yang dilanjutkan dengan uraian Bab II Tinjauan Umum Tentang Kepailitan. Bab ini antara lain akan menguraikan tentang sejarah singkat, utang piutang dalam dunia usaha, hukum kepailitan, penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dan penyelesaian utang piutang melalui penundaan pembayaran utang atau PKPU.

Bab III Hasil – hasil Penelitian dan Pembahasan Terhadap Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. Bab ini merupakan tema penelitian, yang antara lain membahas tentang alasan mengapa debitur memilih penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif dalam mencegah kepailitan, prospek kemampuan debitur dalam membayar utang-utangnya kepada kreditur, kegunaan/manfaat PKPU dalam mencegah kepailitan, dan pertimbangan Hakim dalam putusan perkara PKPU/Kepailitan.

Bab IV Penutup. Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan lembaga penundaan kewajiban

pembayaran utang sebagai upaya hukum untuk mencegah kepailitan.

Di samping kedua sub bab tersebut, pada Bab ini juga akan disampaikan pernyataan teori (theory statement) guna melengkapi hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMANFAATAN PKPU SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN

#### A. Lembaga Kepailitan dan PKPU Pada Umumnya

##### 1. Sejarah Lahirnya Lembaga Kepailitan di Indonesia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissements Ferordening*) adalah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang lahir sebagai reaksi atas terjadinya krisis ekonomi yang melanda di Indonesia.<sup>15</sup> Sesuai dengan kehadirannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang ditetapkan oleh Presiden itu dilakukan dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa.<sup>16</sup> Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan antara lain, mengenai *noodverordeningsrecht*

---

<sup>15</sup>Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hal. 1

<sup>16</sup>Bagir Manan, "Mengenal Perpu Kepailitan," Dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, hal. 67

presiden. Aturan semacam ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dalam keadaan genting, dapat dijamin oleh pemerintah, dengan memaksa pemerintah untuk bertindak secara lekas dan tepat. Adapun pengertian *noodverordeningsrecht* itu sendiri adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada presiden untuk membuat aturan-aturan dengan tata cara yang menyimpang dari tata cara dalam keadaan normal. Hal ini dapat dilakukan karena suatu keadaan darurat atau suatu kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa dimaksud pengertiannya tidak hanya karena suatu ancaman atau kekacauan yang disebabkan adanya pemberontakan. Tetapi juga termasuk unsur-unsur keadaan mendesak, seperti keterdesakan waktu, kebutuhan, atau sesuatu yang timbul karena krisis ekonomi, bencana alam dan atau keadaan tidak normal lainnya.

Kewenangan presiden untuk menetapkan Perpu selain dibatasi dalam hal ini ihwal kegentingan yang memaksa juga pada batas waktu berlakunya. Perpu yang telah dibuat oleh presiden harus diajukan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), selambat-lambatnya dalam masa sidang berikutnya untuk memperoleh pengesahan (atau boleh juga tidak disahkan). Dalam



hal disahkan, maka Perpu tersebut berubah bentuk menjadi undang-undang. Sedang dalam hal DPR menolak, maka perpu tersebut harus dicabut. Demikian juga yang terjadi dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Kepailitan. Di mana setelah disahkan oleh DPR berubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.<sup>17</sup>

Dilihat dari isinya, Undang-undang tentang kepailitan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam hukum ekonomi atau *economic law* atau *wirtschaftrecht* atau *droit economic*.<sup>18</sup> Penggunaan istilah hukum ekonomi semacam itu meskipun telah populer di negara-negara maju, di Indonesia baru biasa digunakan oleh para ahli hukum diakhir tahun 1980-an dan oleh masyarakat luas di tahun 1997, setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi.

Berkembangnya penggunaan istilah hukum ekonomi tersebut juga didorong oleh pesatnya pembangunan ekonomi dan perdagangan antar bangsa. Perkembangan tersebut sebagai konsekuensi dari tuntutan para pihak, baik para pelaku ekonomi, masyarakat dan negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 68

<sup>18</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, hal. 21-23.

ekonomi yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

Namun demikian menurut Rachmadi Usman, sebenarnya masyarakat telah lama mengetahui adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi. Akan tetapi cara pandang hukum ekonomi itu sendiri memang baru mulai digunakan di tahun 1930-an.<sup>19</sup> Di mana pada waktu itu hanya mencakup peraturan-peraturan administrasi negara (*droit administratif*), yang membatasi kaidah-kaidah hukum perdata dan atau hukum dagang, yang kemudian disebut sebagai hukum ekonomi. Menurutnyanya pula, bahwa berkembangnya hukum ekonomi ini bermula dari konsepsi negara kesejahteraan, yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum dan tidak (sebagaimana menjadi pendirian paham negara liberal) hanya menyerahkan kepada warga negaranya untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Untuk itu negara (pada waktu itu diawali oleh Perancis) melalui kaidah-kaidah administrasi negara mengusahakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum (publik).

Keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 21

membatasi hak-hak individu yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata dan hukum dagang ini kemudian dikenal dengan nama *droit economic*. Akan tetapi setelah Perang Dunia II di mana negara-negara Eropa, termasuk Perancis dihadapkan pada keharusan membangun kembali perekonomiannya yang hancur sebagai akibat peperangan, membuat hukum ekonomi semakin berkembang kearah yang lebih luas dalam bidang kehidupan.

Pada waktu itu untuk melakukan pembangunan kembali negara-negara Eropa dibantu oleh IBRD (*International Bank of Reconstruction and Development*) berdasarkan **Marshall Plan**. Karena dana bantuan yang terbatas maka di bawah pengawasan IBRD, Perancis (dan negara-negara Eropa lainnya) harus melakukan pembangunan yang terencana. Dalam pembangunan berencana seperti itu, maka diperlukan berbagai peraturan-peraturan hukum sebagai instrumen untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan anggota masyarakat (*social engineering*) agar mau melakukan hal-hal yang mendukung rencana pembangunan.

Dalam kondisi yang demikian, maka kaidah-kaidah hukum mengarah kepada anggota masyarakat bertambah banyak dan meluas ke segala bidang kehidupan. Sehingga mengubah ciri hukum ekonomi dari kaidah-kaidah hukum yang semula hanya membatasi hukum perdata dan hukum dagang (*droit economique*) menjadi *droit de l'economie*, yaitu kaidah-kaidah hukum yang meluas ke semua bidang hukum. Dengan demikian kaidah-kaidah hukum ekonomi tidak hanya berubah karena bertambah banyak jumlahnya, tetapi juga cirinya.

Di Indonesia, sejarah hukum ekonomi sesungguhnya telah ada sejak jaman pemerintahan Belanda. Landasan Hukum bagi struktur ekonomi yang dualistis diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatregeling* (Stb. 1854:2 dan Stb. 1855:2). Di mana dalam ketentuan tersebut diatur tentang kedudukan Eropa, Timur Asing dan Bumiputra secara berbeda. Dalam pasal-pasal itu juga merupakan kaidah yang sesungguhnya menunjang kebijaksanaan ekonomi yang dualistis.<sup>20</sup> Karena di dalam pasal-pasal tersebut mengatur peran yang dominan kepada golongan Eropa dalam sektor perdagangan internasional, industri dan

---

<sup>20</sup>Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal. 22

perbankan. Sedangkan golongan Bumiputra didudukan perannya dalam sektor pertanian dan penghasil bahan mentah, dan golongan Timur Asing sebagai pedagang perantara bagi kedua golongan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan politik hukum Hindia Belanda yang demikian itu, maka lahirlah berbagai peraturan yang mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian golongan penduduk Hindia Belanda, yang merupakan suatu *verwaltungswirtschaft*. Pada waktu itu hukum dipergunakan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, sehingga pemerintah Hindia Belanda dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pendayagunaan potensi kekayaan alam di Negeri Hindia Belanda. Meskipun golongan Eropa diberi kebebasan menguasai perekonomian dengan hukum tersendiri seperti itu, dalam hal tertentu golongan Timur Asing dan Bumiputra juga ditundukkan kepada hukum harta kekayaan golongan Eropa.

Bahkan untuk kepentingan mereka juga (baca golongan Eropa) di tahun 1905, *Faillissements Verordening*(Undang-

undang Kepailitan) mulai diberlakukan guna melindungi investasi golongan Eropa di negeri Hindia Belanda. Dalam undang-undang ini, ditentukan bahwa setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit. (Pasal 1 ayat (1) *Faillissements Verordening*).<sup>21</sup> Selain itu, kepada orang-perorang pun, termasuk perempuan yang bersuami, apabila dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan, atau mempunyai suatu kekayaan sendiri, iapun dapat dinyatakan pailit. (Pasal 3). Ketentuan-ketentuan seperti ini jelas memberikan perlindungan kepada pihak berpiutang (kreditur) atas piutangnya, di mana pada waktu itu umumnya adalah golongan Eropa.

Namun dalam perjalanannya sesudah proklamasi, pailisemen atau kepailitan menjadi kurang populer. Hal ini disebabkan, karena Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) yang selalu tampil dengan peran yang dominan dalam pelaksanaan

---

<sup>21</sup>Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal. 13

pailisemen, tidak memuaskan.<sup>22</sup> Bahkan kemudian di dalam prakteknya pailisemen malah menjadi momok bagi para kreditur. Sehingga, apabila ada debitur mengalami kredit macet yang hendak meminta pailisemen ditolak oleh para krediturnya. Akibatnya Peraturan Kepailitan atau *Fallisements Ferordening* menjadi tidak dikenal oleh masyarakat. Apalagi setelah kebijakan pemerintah diawal kemerdekaan lebih tercurah kepada masalah-masalah politik, maka hukum ekonomi kurang mendapat perhatian.

Pada masa orde baru, hukum ekonomi mengalami perkembangan yang relatif cepat, seiring dengan pelaksanaan restrukturisasi dan pembangunan berencana di bidang ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena program pemerintah tersebut telah memberi secara langsung terhadap dinamika dan pergeseran yang berupa *judgments* dan *reajudgements* terhadap hukum ekonomi. Meskipun demikian secara umum masyarakat belum banyak yang memahami bahwa peraturan perundang-undangan yang secara formal sesungguhnya mengatur dan atau membatasi kegiatan ekonomi tertentu serta memiliki akselerasi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 2

dengan pembangunan ekonomi tersebut adalah termasuk hukum ekonomi.<sup>23</sup>

Kenyataan seperti itu tidak saja terjadi di masyarakat luas, di perguruan tinggi yang menyelenggarakan studi ilmu hukum sekalipun pada waktu itu belum ada yang melakukan konsentrasi kajian atas hukum ekonomi. Bahkan belum banyak staf pengajar yang mengkhususkan diri dalam studi hukum ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu seluruh lapisan masyarakat telah terkesima dalam pembangunan ekonomi yang menakjubkan, yang dilakukan oleh para ekonomi dan teknokrat. Semua masyarakat juga telah percaya bahwa Indonesia memiliki struktur pondasi ekonomi yang kuat yang segera akan menghantarkan Indonesia menjadi negara industri baru (*newly industrialized country*), tanpa perlu dibingkai dengan hukum ekonomi yang melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Namun dalam perjalanannya, ternyata tidak seperti yang diharapkan, bahkan secara mengejutkan struktur pondasi bangunan ekonomi yang pernah mendapat pujian dari berbagai

---

<sup>23</sup>Hasil Seminar Universitas Indonesia, *Membangun Indonesia Baru*,



lembaga donor internasional tersebut menjadi hancur, pembangunan ekonomi tidak berjalan dan Indonesia memasuki krisis multi dimensi, sehingga meruntuhkan rejim orde baru yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Dalam keadaan seperti itu, melalui analisa para ahli kemudian diketahui bahwa pembangunan ekonomi yang tidak dibingkai dengan hukum yang melindungi dan mensejahterakan masyarakat maka akan mengalami kegagalan. Sebab dalam kealpaan hukum ekonomi berbagai perbuatan *moral hazard* yang membahayakan pembangunan ekonomi, seperti korupsi, kolusi, insider trading, mark up, monopoli dan kejahatan korporasi – tidak dapat dihindarkan.<sup>24</sup>

Oleh karena itu pemerintahan transisi (yang diawali oleh Presiden B.J. Habibie) telah melakukan revisi (*revised*) dan memperkenalkan (*introduced*) berbagai hukum ekonomi, sebagai respon dari krisis yang terjadi dan tuntutan dari lembaga-lembaga donor internasional. Di mana salah satu dari hukum ekonomi tersebut adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (*Bankruptcy law*). Undang-undang ini lahir sebagai

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

tuntutan dari pihak pemberi bantuan keuangan kepada Indonesia, antara lain IMF (*International Monetary Fund*) yang mengharapkan supaya sarana hukum yang mengatur soal pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur, yaitu *Faillissements Ferordening* diperbaiki, karena dianggap kurang memadai dan masih merupakan peninggalan zaman kolonial.<sup>25</sup>

## **2. Tujuan dan Arti Pentingnya Lembaga Kepailitan Dalam**

### **Dunia Usaha**

Kehadiran Undang-undang kepailitan tersebut akan sangat penting artinya bagi para kreditur, yang pada waktu itu diminta untuk menyetujui restrukturisasi hutang para debitur (pengusaha Indonesia) sebagai jaminan kepastian bahwa hutangnya akan dapat dibayar. Selain itu bagi debitur, kehadiran undang-undang ini tentunya juga diharapkan akan dapat memberikan peluang kepada debitur untuk menghindari kepailitan, karena dapat menunda pembayaran utangnya.

Selain hal-hal diatas adalah bahwa dalam lembaga kepailitan juga menyediakan mekanisme yang terbuka, baik oleh

---

<sup>25</sup>Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal. 1

pihak debitur maupun kreditur, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang adil, cepat dan efektif dalam penyelesaian utang-piutang.<sup>26</sup>

Memang sistem yang sekarang berlaku dalam pemeriksaan perkara perdata menurut HIR, juga harus berlaku cepat, terbuka dan efektif, serta adil sebagai dasar dari segala sendi-sendi hukum yang tertulis maupun tidak tertulis (*billijheid en rechisvaardigheid, = ijnde beginselen van ongeshrevene rechi*). Namun dalam prakteknya, kurang efektif dan waktunya sangat lama. Selain itu juga masih adanya upaya hukum banding yang juga dapat memperpanjang proses dan mekanismenya tidak terbuka (karena dalam Pengadilan Banding, Majelis Hakim mengadili sendiri), sehingga sering tidak memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu lembaga kepailitan yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang memberikan pembatasan waktu dalam setiap upaya hukum, akan dapat menghilangkan berbagai kelemahan sebagaimana apabila debitur dan atau kreditur memilih

---

<sup>26</sup>Sudargo Gautama, *Ibid.*, hal. 4. Baca juga Rudhy A. Lontoh, Dkk, *Penyelesaian Utang-Piutang*, Djambatan, Jakarta.

menggunakan sengketa perdata. Dengan demikian lembaga kepailitan (yang harus terus disempurnakan) akan memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung dunia usaha, khususnya pada saat sekarang di mana banyak perusahaan yang mengalami Kesulitan likuiditas, sehingga tidak dapat membayar utang-utangnya yang jatuh waktu dan dapat ditagih.

### 3. Utang-Piutang Dalam Dunia Usaha

Di Indonesia bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang umum dikenal sebagai pelaku dalam dunia dari usaha hingga saat ini sangat beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut badan usaha tersebut merupakan peninggalan zaman kolonial. Beberapa memang telah diganti dengan nama sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi sebagian masih ada yang tetap menggunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakainya, antara lain *Maatschap*, *Firma* yang disingkat Fa, dan *Commanditaire Vennootschap* yang disingkat CV.<sup>27</sup>

Sedang yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa

---

<sup>27</sup>I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, hal. 12

Indonesia seperti Perseroan Terbatas atau disingkat PT, sebenarnya berasal dari sebutan *Naamloze Vennootschap* yang disingkat NV. Karena hal ini kemudian dapat dijumpai badan usaha dengan sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas. Atau penggunaan kata perseroan dalam arti yang luas, sebagai penyebutan untuk perusahaan pada umumnya.

Selain itu ada satu bentuk badan hukum yang sebenarnya bukan merupakan badan usaha, tetapi belakangan dalam kegiatannya banyak melakukan usaha (*business*), yaitu Yayasan (*Stichting*), bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris disamakan dengan *Foundation*). Pada waktu dulu *Stichting* atau Yayasan dijalankan untuk suatu maksud dan tujuan yang ideal dan melakukan kegiatan dibatasi hanya dalam bidang sosial. Namun dalam perkembangannya untuk dapat melakukan kegiatannya dibidang sosial tersebut, yayasan harus memiliki dana sendiri yang memadai. Dimana hal ini hanya dapat dipenuhi secara mandiri, apabila yayasan memiliki kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan.

Meskipun demikian dalam prakteknya, dibandingkan dengan badan hukum lainnya, seperti perusahaan komanditer (CV),

firma atau yayasan --- perseroan terbatas merupakan badan hukum yang paling banyak dipilih oleh masyarakat pelaku usaha. Pilihan ini didasarkan atas berbagai keuntungan yang dapat dinikmati, antara lain yaitu :<sup>28</sup>

- a. Sebagai alat (instrumen) dalam mempermudah pengumpulan dana untuk modal (*authorized capital*);
- b. Memberikan perlindungan dan dapat mengurangi resiko dalam investasi;
- c. Menjanjikan pembagian keuntungan (dividen) dari hasil usaha kepada para pemegang saham (penanam modal).

Atas dasar keuntungan-keuntungan tersebut, maka perseroan terbatas (*limited liability*) sering disebut sebagai mesin uang kapitalisme.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyebutkan bahwa perseroan terbatas atau biasa disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar (*authorized capital*) yang seluruhnya terbagi dalam saham (saham atau share), dan memenuhi persyaratan yang

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 140. Baca juga Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

ditetapkan dalam undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Sehingga dengan merujuk pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa nilai (value) dari perseroan terbatas atau perusahaan (*corporation*) adalah 'perjanjian.' Dimana salah satu syarat dari adanya sebuah perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 UU KUH Perdata).

Dengan demikian karena dasar didirikannya perusahaan adalah itikad baik dan pendirinya memiliki berbagai keuntungan dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan diatas, maka UUPA mengatur perseorangan yang mendirikan atau mengurus perusahaan harus tetap diberikan tanggung jawab agar tidak merugikan perusahaan maupun pihak lain atau kepentingan umum. Dianutnya *piercing corporate veil doctrine* seperti ini agar dengan terikatnya perseorangan dalam suatu perusahaan, baik itu pemegang saham (*share-holder*) maupun pengurus perusahaan (direksi dan komisaris) yang semula memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) menjadi tidak terbatas (*unlimited liability*) dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>29</sup> Adapun keadaan-keadaan tertentu dimaksud antara lain, yaitu :

---

<sup>29</sup>Tentang doktrin *piercing corporate veil* dapat dibaca dalam I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, hal. 145-147

- a. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang ditanamkan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak terlalu apabila :
- persyaratan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itukad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
  - pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
  - pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
- b. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa pendaftaran dan pengumuman atas perseroan belum dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan;



- c. Dalam Pasal 60 (3) disebutkan bahwa dalam dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris secara renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Namun apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya, maka direksi dan komisaris dibebaskan dari tanggung jawabnya;
- d. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan, atas :
- permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
  - permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  dari jumlah saham dengan hak suara yang sah;
  - permohonan kreditur berdasarkan alasan :
    - perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
    - harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau

- permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan.

Mencermati beberapa ketentuan diatas (dan masih ada pasal-pasal yang lainnya) bahwa dianutnya *doktrin piercing corporate veil* dalam UUPT dikandung maksud agar agar bentuk-bentuk pengingkaran terhadap itikad baik yang menjadi nilai dasar didirikannya perseroan dan segala kegiatan usahanya, tetap harus menjadi tanggung jawab para pemegang saham dan atau pengurusnya, sebagai bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duties*). Sehingga dalam kegiatan usahanya, mereka para pemegang saham dan atau pengurus tidak merugikan perseroan atau pihak lain yang melakukan perikatan dengan perseroan atau terhadap kepentingan umum.

Dengan dianutnya doktrin *piercing corporate veil* dalam UUPT seperti itu diasumsikan bahwa rantai usaha (*business chain*) dari perseroan dan kepentingan umum tidak akan dirugikan. Hal ini akan sangat penting sebagai dasar kepercayaan yang dimiliki oleh perseroan (selanjutnya disebut perusahaan) untuk membuat perikatan dengan pihak-pihak tertentu, baik perseorangan maupun badan hukum. Dimana perikatan tersebut diperlukan untuk

memberikan dukungan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun dukungan dimaksud dapat berupa :

- a. penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan;
- b. jasa pemasaran atau penjualan; atau
- c. finansial, sebagai tambahan modal kerja (*working capital*) perusahaan.

Dalam dunia usaha ketiga dukungan diatas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya perikatan utang-piutang antara perusahaan dengan pihak-pihak pendukungnya. Namun dalam hal ini, sepertinya masing sering terjadi perbedaan pendapat dalam kaitannya dengan putusan kepailitan. Sebab, dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, memberikan pengertian utang dalam arti yang sempit, yaitu dengan hanya menyebutkan “utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.” Sementara masyarakat masih berpegang kepada pengertian utang dalam arti yang luas, yang meliputi segala kewajiban yang lahir dari hukum

perjanjian. Perbedaan pengertian seperti ini telah menimbulkan panafsiran yang diskresioner (*discretionary*) tentang obyek kepailitan.

Dalam perkara kepailitan antara Drs. Husen Sani dan Johan Subekti melawan PT. Modernland Realty Ltd., misalnya, dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarat Pusat No. 07/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst. antara lain memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun tersebut, maka Termohon adalah wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima tersebut, maka Termohon harus dinyatakan telah mempunyai utang kepada masing-masing para Pemohon.”

Putusan diatas menganut pandangan yang luas tentang istilah utang, yakni utang yang lahir dari perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun.

Sedang Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah Agung) dalam putusan No. 08/KN/1998 atas kasasi yang diajukan oleh Modernland Realty Ltd. telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa *yudex factie* telah salah dalam menerapkan hokum didalam menentukan objek kepailitan, karena pada hakekatnya hubungan hokum

yang ada antara para Termohon kasasi (dahulu Termohon Asal/PT. Modernland Realty Ltd.) adalah hubungan pengikatan jual beli mengenai satuan rumah susun Golf Modern yang dibangun oleh Pemohon Kasasi dengan pembayaran secara angsuran oleh Para Termohon Kasasi, sehingga karenanya merupakan perikatan antara produsen dan konsumen. Sedangkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, beserta penjelasannya telah dicantumkan dengan jelas adanya hubungan hukum utang dan bahwa pengertian utang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya. Sehingga karenanya tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang.”

Dalam putusan tersebut berarti Mahkamah Agung telah menafsirkan utang dalam arti yang sempit sebatas pada wanprestasi yang berawal konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

Namun dalam perkara kepailitan yang lain, Mahkamah Agung tidak konsisten dengan penafsirannya. Dalam putusan No. 01/K/N/1999, misalnya, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud utang dalam kaitannya dengan kepailitan, sehingga telah menimbulkan berbagai penafsiran, namun menurut Majelis yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepailitan maupun karena perikatan, yang dapat dinilai dengan jumlah uang tertentu.”

Dengan demikian, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menafsirkan utang dalam arti yang luas, tidak sebatas pada

apa yang timbul karena undang-undang, tetapi juga dalam bentuk wanprestasi lain yang berawal dari perikatan.

Perbedaan penafsiran sebagai akibat tidak jelasnya ketentuan dalam undang-undang seperti itu tentu dapat menyebabkan ketidak pastian hukum, sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang membuat perikatan dan atau masyarakat pada umumnya. Karena itu, dalam draft perbaikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, pengertian utang dirumuskan menjadi, sebagai berikut :

“Bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia, maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi oleh debitur memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari kekayaan debitur.”

Dengan perumusan utang secara luas seperti itu, maka segala hal yang timbul dalam bentuk wanprestasi dari kegiatan usaha, seperti jual-beli dengan tidak dibayar tunai (*cash*), *leasing*, perjanjian pemborongan, *bills of exchange* yang telah disetujui, pengalihan utang (*cassie*), subrogasi, atau bentuk-bentuk perjanjian lain yang dapat menimbulkan utang, dapat dijadikan objek

kepailitan.<sup>30</sup> Hal yang demikian ini pada waktunya nanti tentu akan lebih memberikan kepastian hukum, dan tentunya juga jaminan transaksi dalam dunia usaha.

#### 4. Pengaturan Lembaga Kepailitan pada Umumnya

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa peraturan kepailitan (*Faillissements Ferordening*) yang diberlakukan di negeri Hindia Belanda (Indonesia) adalah untuk golongan Eropa. Karena itu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan pembaharuannya tidak didasarkan atas dasar sifat atau karakter kolonial, melainkan sebagai tuntutan perkembangan dan kebutuhan baru. Hal-hal yang baru tersebut antara lain menyangkut keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam menghadapi kepailitan, kepastian proses – baik waktu, tata cara, maupun kesederhanaannya, tanggung jawab pengelolaan boedel pailit, dan forum yang lebih profesional.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Tentang hutang dalam arti luas ini dapat dibaca dalam buku J. Satrio, *Cassie, Subragatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Utang*, Alumni, Bandung

<sup>31</sup>Sudargo Gautama, op.cit., hal. 6-38. Baca juga Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. hal. 1-5.

Indonesia. Yang dimaksud 'bank' adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998);

- 3). Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Yang dimaksud dengan 'perusahaan efek' adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Mengikuti aturan diatas, maka untuk kepailitan 'bank' dan 'perusahaan efek,' debitur dan kreditur tidak diberi hak untuk mengajukan permohonan pailit. Pembatasan untuk bank dan perusahaan efek seperti itu diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kepailitan. Prinsip



Indonesia. Yang dimaksud 'bank' adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998);

- 3). Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Yang dimaksud dengan 'perusahaan efek' adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Mengikuti aturan diatas, maka untuk kepailitan 'bank' dan 'perusahaan efek,' debitur dan kreditur tidak diberi hak untuk mengajukan permohonan pailit. Pembatasan untuk bank dan perusahaan efek seperti itu diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kepailitan. Prinsip

kehati-hatian ini diperlukan untuk mencegah akibat-akibat ekonomis yang buruk kepada masyarakat secara luas.

#### **b. Proses Pemeriksaan Permohonan Kepailitan**

Undang-undang tentang Kepailitan mengatur secara ketat bingkai waktu (*time frame*)<sup>32</sup> atas penyelesaian proses kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa permohonan kepailitan, harus memutuskan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Demikian pula Mahkamah Agung, harus memutus permohonan kasasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak didaftarkan. Penentuan waktu seperti itu dikandung maksud agar proses penyelesaian kepailitan tidak berlarut-larut, sehingga kreditur tidak dirugikan baik secara ekonomis maupun psikologis. Ketentuan ini merupakan perubahan atas Pasal 4 Peraturan Kepailitan, yang tidak menyebutkan batasan waktu. Dimana dalam ketentuan tersebut hanya mengisyaratkan agar proses penyelesaian kepailitan diperiksa selekas-lekasnya dalam rapat permusyawaratan hakim.

---

<sup>32</sup>Baca tentang penggunaan waktu dalam proses kepailitan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang proses permohonan pailit dalam undang-undang kepailitan tersebut, dapat dilihat dalam bagan berikut :

**c. Upaya Hukum Dalam Kepailitan**

Undang-undang tentang Kepailitan meniadakan upaya hukum banding atas putusan penetapan kepailitan. Upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Niaga) hanyalah melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan ini merupakan perubahan atau perbaikan dari peraturan kepailitan (*Faillissements Ferordening*), yang memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk melakukan upaya hukum perlawanan dan banding (meskipun dalam peraturan kepailitan tersebut tidak diatur upaya hukum kasasi).

Peniadaan upaya hukum banding seperti itu dimaksudkan agar proses permohonan kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan tidak berbelit-belit. Karena dalam proses kasasi tersebut, Mahkamah Agung harus memberikan putusannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 10 ayat (3) UUK). Dalam hal ini selain upaya

kasasi, upaya hukum peninjauan kembali juga dimungkinkan, sepanjang persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 dapat dipenuhi. Untuk jelasnya lihat bagan berikut :

Sejalan dengan maksud dari peniadaan banding dan langsung pada upaya hukum kasasi itu, maka proses kepailitan tidak berkepanjangan sebagaimana yang biasa terjadi pada penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri.<sup>33</sup> Sehingga sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dalam tingkat kasasi-pun, Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi itu, karena :

- 1). tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Selain upaya hukum kasasi, terhadap putusan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam hal

---

<sup>33</sup>Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *op.cit.*, hal. 19-24

ini seperti diatur dalam Pasal 286 ayat (1), disebutkan :

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”

ketentuan diatas menunjukkan bahwa disamping terhadap putusan kasasi, melalui penasehat hukumnya (yang memiliki ijin praktek) pihak tertentu (debitur atau kreditur) dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga ditingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan pengadilan tersebut tidak digunakan upaya hukum kasasi.

Adapun alasan-alasan untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah.<sup>34</sup>

- 1). terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- 2). Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Terhadap ketentuan tersebut, apabila dibandingkan dengan alasan-alasan peninjauan kembali terhadap putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

---

<sup>34</sup>Lihat Pasal 286 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

maka alasan peninjauan kembali dalam Undang-undang tentang Kepailitan lebih sempit dan masih memerlukan pemahaman terhadap alasan bahwa Pengadilan Niaga melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan yang telah memperoleh putusan kekuatan hukum tetap ini jangka waktunya ditentukan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- 1). terhadap permohonan peninjauan kembali karena alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a, jangka waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari; dan
- 2). terhadap permohonan peninjauan kembali karena alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b. jangka waktunya adalah 30 (tiga puluh) hari.

Namun dalam hal permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dalam Undang-undang tentang kepailitan tidak mengatur batas jangka waktunya. Didalam Pasal 11 hanya disebutkan “terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dengan tidak adanya pembatasan waktu dalam ketentuan tersebut, tentu bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dapat mengganggu proses permohonan kepailitan yang cepat dan tidak berbelit-belit, seperti yang diharapkan oleh Undang-undang tentang Kepailitan.

#### **d. Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur Yang Merugikan Kreditur**

Untuk menjaga harta pailit agar tidak merugikan kreditur, maka perlu ada ketentuan yang mengatur pembatalan perbuatan hukum debitur. Lembaga perlindungan hak kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini dikenal dengan nama *actio pauliana*.<sup>35</sup> Ketentuan seperti tersebut telah ada dalam peraturan kepailitan (*Faillissements Ferordening*), yaitu pada Pasal 41. Pada pasal tersebut disebutkan, "... untuk kepentingan harta pailit bolehlah dimintakan pembatalan terhadap segala perbuatan si berutang yang tak diwajibkan, yang

---

<sup>35</sup>Kartini Muljadi, "*Actio Paulina dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga*," dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., *Penyelesaian Utang-Piutang*, Alumni, Bandung, hal. 302-303

dengan dalih apapun juga dilakukannya sebelum pernyataan pailit, yang merugikan pada berpiutang, asal saja dibuktikan bahwa sewaktu melakukan perbuatan, baik sekarang maupun orang dengan siapa atau untuk kepentingan siapa perbuatan itu dilakukannya, mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian para berpiutang.

Dalam Undang-undang tentang Kepailitan, ketentuan tersebut diperjelas menjadi 2 (dua) ayat dan 1 (satu) ayat tentang adanya perbuatan pengecualian. Sehingga dalam Pasal 41 Undang-undang tentang Kepailitan seluruhnya diatur sebagai berikut :

- 1). Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit;
- 2). Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui,



atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur;

- 3). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

Selain hal itu, adalah tentang batas waktu atas perbuatan hukum debitur yang dapat dibatalkan. Dalam peraturan yang lama batas waktunya ditentukan 40 (empat puluh) hari sebelum pernyataan pailit. Sedang dalam Undang-undang tentang Kepailitan, batas waktu tersebut ditentukan 1 (satu) tahun sebelum penetapan pailit. Perpanjangan batas waktu dimaksud untuk menjaga agar debitur melakukan perbuatan curang untuk dengan sengaja menghindarkan aset (-asetnya) agar tidak dimasukkan kedalam boedel pailit. Penetapan perpanjangan batas waktu menjadi 1 (satu) tahun ini dianggap wajar, karena pada umumnya debitur telah dapat merasakan kesulitan usahanya paling tidak 1 (satu) tahun sebelum jatuh pailit. Sehingga kalau terlalu pendek (seperti dalam peraturan kepailitan, yang hanya 4 (empat) bulan), kurang dari satu tahun dapat merugikan kreditur.

Adapun perbuatan hukum debitur, yang dapat dibatalkan tersebut adalah :

- 1). merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
- 2). merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- 3). dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap :
  - suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
  - dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap :

- anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau semua/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
- perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- perorangan yang suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya, sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila :

- perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
- suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;
- debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama-sama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya dan

keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

- dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum di mana debitur adalah anggotanya.

Selain hal-hal diatas, hibah yang dilakukan oleh debitur juga dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian kreditur. (Pasal 43 UU Kepailitan).

**e. Hak Eksekusi Kreditur Preferen dan Hak Pihak Ketiga Atas Harta yang Ada Pada Debitur Pailit**

Pada prinsipnya pada peraturan kepailitan maupun undang-undang tentang kepailitan yang baru diatur tentang hak kreditur preferen. Dalam hal ini diatur bahwa setiap kreditur preferen, yaitu kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya melakukan

eksekusi atas haknya tersebut seolah-olah dilakukan oleh pihak ketiga atas hartanya yang ada pada debitur pailit atau kurator.

Namun, dalam ketentuan yang baru (Undang-undang tentang Kepailitan) tersebut, dimungkinkan untuk dilakukan penangguhan hingga jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Tetapi penangguhan ini tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk menumpakan utang.

Munculnya ketentuan penangguhan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan itu, dikandung maksud untuk lebih menguntungkan pihak kreditur ataupun pihak ketiga. Disamping tentunya juga ketentuan itu untuk menjaga kelangsungan usaha debitur. Sehingga untuk itu, kurator diberikan kewenangan untuk menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasannya, sepanjang kepentingan kreditur dan pihak ketiga telah diberikan perlindungan yang wajar. (Pasal 56A ayat (3) UUK).

#### f. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga (*Commerdial Court*) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah Pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Umum. Jadi bukan merupakan badan peradilan yang berdiri sendiri.<sup>36</sup> Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani masalah-masalah yang khusus tentang kepailitan (*failisements* atau *bankruptcy*). Tugas lembaga ini (baca Pengadilan Niaga) pada saat sekarang hanyalah memeriksa dan memutus permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran utang pada pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis.

Oleh karena itu, pada saat dimulai berlakunya undang-undang tentang kepailitan hanya ada satu Pengadilan Niaga, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangannya adalah bahwa perkara kepailitan umumnya hanya akan terjadi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Namun dalam perkembangannya Pengadilan Niaga telah dibentuk di beberapa kota besar lainnya, seperti di Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang.

---

<sup>36</sup>Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal. 13. Baca juga Rudhy A. Lontoh, Dkk., *Ibid.*, hal. 13-21 dan Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, *op.cit.*, hal. 41-42

Pertimbangannya bahwa dikota-kota tersebut adalah tempat kedudukan BHP.

Dimasa depan Pengadilan Niaga harus dikembangkan disetiap kota sejalan pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga harus diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kecenderungan semacam ini akan memiliki implikasi yang baik dalam dunia usaha, karena adanya jaminan kepastian hukum yang melindungi debitur dan kreditur, serta masyarakat pada umumnya.<sup>37</sup>

Penetapan Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan atau perkara kepailitan semata-mata untuk mengefisienkan proses pemeriksaan permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran, agar *time-frame* sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dapat dipenuhi. Sedangkan pengorganisasian lembaga ini sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peradilan umum.

Adapun hakim pada Pengadilan Niaga adalah hakim-

---

<sup>37</sup>Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Ibid*.



hakim yang secara khusus ditugasi untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan. Hakim-hakim ini diangkat berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, dengan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1). telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
- 2). mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
- 3). berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- 4). telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Selain hakim-hakim dengan persyaratan diatas, dalam Pengadilan Niaga ditingkat pertama juga diatur tentang pengangkatan seseorang ahli sebagai hakim *ad hoc*, dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan. Pengaturan seperti ini didasarkan bahwa hakim bukanlah orang yang mengetahui secara mendalam tentang seluk-beluk dalam dunia usaha, sehingga dalam memeriksa dan

---

<sup>38</sup>Pasal 283 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

memutus perkara kepailitan perlu dibantu seseorang ahli sebagai hakim *ad hoc*.

#### **g. Kurator Dalam Hal Pailit**

Dalam peraturan kepailitan (*Failisements Ferordening*), BHP (Balai Harta Peninggalan) merupakan satu-satunya lembaga yang mengurus boedel pailit. Sehingga sejak peraturan kepailitan itu diterapkan di Indonesia, BHP memiliki peran yang sangat dominan dalam penyelesaian kepailitan. Akibatnya, karena lembaga ini dipandang kurang menguntungkan kreditur dalam penyelesaian harta pailit, dalam perjalanan pelaksanaan peraturan kepailitan BHP menjadi momok bagi para kreditur menyelesaikan utang-piutang melalui lembaga kepailitan.<sup>39</sup>

Oleh karena itu dan juga semakin meluasnya lingkup kepailitan dengan berbagai kompleksitas permasalahannya, maka dalam undang-undang tentang kepailitan ditetapkan kurator lain selain BHP. Lembaga tersebut (kurator) merupakan lembaga swasta tidak seperti BHP yang berada dibawah lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau

---

<sup>39</sup>Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal. 2-3

pemerintah. Kehadiran kurator (swasta) ini tentunya adalah sangat baik, karena disamping membuka peluang profesi atau usaha jasa baru dilingkup hukum, juga dapat menciptakan suasana persaingan sehat yang akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan atas boedel pailit, dan proses penyelesaian perkara kepailitan.<sup>40</sup> Karena masing-masing kurator tersebut akan berusaha sebaik mungkin menunjukkan kinerjanya, agar dapat memenangkan persaingan dalam memperebutkan *clien*-nya. Persaingan semacam ini tentu dapat menguntungkan para pihak yang berperkara kepailitan, baik itu kreditur maupun debitur.

## B. Lembaga PKPU Dan Penyelesaian Utang

### 1. Tentang Kepailitan

#### a. Pengertian

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur (*algemen beslag*) untuk kepentingan semua krediturnya.<sup>41</sup> Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan

---

<sup>40</sup>Timur Sukirno, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan *Actio Paulina*," dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., *op.cit.* hal. 370-371

<sup>41</sup>Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal. 3

debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak masing-masing kreditur tersebut secara ahli. Dengan demikian dalam pelaksanaan sita umum harus dihindari sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Pelaksanaan sita umum tersebut juga mencakup kekayaan debitur yang berada diluar negeri, meskipun dianut asas teritorialitas sehubungan dengan prinsip kedaulatan negara (lihat Pasal 202-204 UUK).

#### **b. Pernyataan Pailit**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya untuk dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, Pasal 1 Undang-undang tentang Kepailitan menegaskan paling sedikit harus ada dua kreditur, dan debitur sedikitnya tidak dapat membayar (*setop to pay*) satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan 'paling sedikit harus ada dua kreditur' adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Dimana ditentukan bahwa pada dasarnya

pembagian kekayaan debitur kepada para krediturnya harus dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya tagihan kreditur masing-masing (*pari passu pro rata parte*).<sup>42</sup> Selain hal ini, dalam Pasal 1 Undang-undang tentang Kepailitan juga ditetapkan lembaga-lembaga tertentu yang dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadap siapa saja permohonan itu dapat diajukan.

Setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan maka semua pernyataan pailit hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Penetapan ketentuan seperti ini dimaksudkan agar jangka waktu yang ditetapkan dalam proses kepailitan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan hal ini, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan maka Pengadilan Niaga wajib memanggil debitur. Apabila debitur tidak mau hadi, maka Pengadilan Niaga akan menetapkan putusan pailit dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Selain itu undang-undang tentang kepailitan juga

---

<sup>42</sup>H.P. Panggabean, "*Penerapan Asas-Asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan*," dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., op.cit., 139-141

mengatur ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan transparansi dalam proses hukum acaranya.<sup>43</sup> Hal ini diperlukan untuk mendapatkan penetapan putusan pernyataan pailit secara objektif dan berkeadilan sesuai dengan hak masing-masing pihak.

### c. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Kreditur

Pada dasarnya, kedudukan kreditur adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang adil atas hasil eksekusi dari boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan kreditur tersebut masing-masing. Namun demikian, dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu kepada kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan, dan kreditur yang haknya didahulukan oleh undang-undang kepailitan dan peraturan. Perundang-undangan lainnya -- dapat melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Sehubungan dengan kedudukan kreditur preferen

---

<sup>43</sup>*Ibid.* Baca juga Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, hal. 24-26

(*separatist*), karena memegang hak istimewa (*privileges*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56A Undang-undang tentang Kepailitan, maka undang-undang memperkenalkan lembaga baru, yaitu penangguhan hak eksekusi kreditur. Penangguhan ini dimaksudkan agar kurator dapat mengurus boedel pailit secara teratur, demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan.

Dengan demikian, meskipun kedudukan kreditur adalah sama dalam kepailitan, tetapi ada pada pranteknya dalam pengurusan dan atau pembesaran boedel pailit, tidak sama kreditur akan mendapatkan haknya secara penuh sesuai dengan besarnya tagihan kreditur masing-masing.

#### **d. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitur**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, kepailitan adalah meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan juga kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan. Adapun yang dimaksud dengan

kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat dituangkan (*ten gelde kunnen worden gemakt*).<sup>44</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-undang tentang Kepailitan merinci barang atau hak atas benda yang tidak termasuk dalam kepailitan, yaitu antara lain :

- 1) barang-barang yang disebutkan dalam Pasal 451 ayat (2) s.d. (5) dari Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749 ayat (3) huruf e reglemen tersebut, dan pengarang dalam hal-hal dimana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam Pasal 452 ayat (1) reglemen tersebut, kecuali apabila dalam kepailitan itu memajukan diri orang-orang berpiutang mengenai penagihan-penagihan yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini;
- 2) segala apa yang diperoleh di pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekedar ditentukan oleh Hakim Pengawas;

---

<sup>44</sup>I.G. Rai Widjaya, *op.cit.*, hal. 178-185



- 3) segala uang yang diberikan kepada si pailit untuk memenuhi suatu kewajiban untuk memberi nafkah menurut undang-undang;
- 4) sesuatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dari pendapatan hak nikmat-hasil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 311 KUH Perdata, untuk membiayai beban yang disebutkan dalam Pasal 312 KUH Perdata.
- 5) Tunjangan yang oleh si pailit, berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata, diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Meskipun dalam hal yang demikian, debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang termasuk dalam boedel kepailitan. Artinya, jika debitur melanggar hukum ketentuan ini maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi boedel pailit.

Oleh karena itu sejak penetapan putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengelolaan dan

pemberesan boedel pailit ditugaskan kepada kurator. Sesuai dengan ketentuan yang dapat menjadi kurator, selain BHP (Balai Hukum Peninggalan) adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam mengurus dan atau membereskan boedel pailit.

Mengingat bahwa pihak yang paling berkepentingan dalam pengurusan dan atau pemberesan boedel pailit adalah kreditur preferen (konkuren) maka atas permintaan atau usul kreditur tersebut, Pengadilan Niaga harus memberhentikan dan mengganti kurator. (Pasal 67B UUK).

Untuk kepentingan yang sama (baca kepentingan kreditur), Pengadilan Niaga juga menetapkan Hakim Pengawas, yang berupa mengawasi pengurusan dan atau pemberesan boedel pailit oleh kurator. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perbuatan curang yang dilakukan oleh kurator atau atas kerjasama antara kurator dengan debitur.

Merujuk pada berbagai hal diatas, bahwa pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah sama artinya dengan diberhentikannya kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur. Akibat dari keadaan ini juga adalah terhenti atau terganggunya kegiatan usaha lain yang menjadi rantai usaha dari perusahaan yang dinyatakan pailit. Atau dengan perkataan lain, bahwa pernyataan pailin akan memiliki akibat yang luas terhadap dunia usaha, baik itu terhenti atau terganggunya kegiatan usaha juga bertambahnya pengangguran, serta dampak ekonomi dan sosial lainnya.

## **2. Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU**

### **a. Pengertian**

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 pada Pasal 212, bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau

sebagian utang kepada kreditur konkuren.<sup>45</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut PKPU) berbeda dari kepailitan.

Perbedaannya adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan boedel pailit (likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, tetapi juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur perferen (konkuren).

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang (-utangnya) seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitur untuk dapat

---

<sup>45</sup>Pasal 212 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

melunasi utang-utangnya.<sup>46</sup> Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecenderungan merugikan para krediturnya. Karena itu dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitur dapat melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang sahamnya) atau melakukan reorganisasi usahanya, agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.

Sesuai dengan sifatnya, dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, persyaratannya lebih ringan dibanding dengan kepailitan. Hal ini didasarkan pada akibat hukumnya. Dimana pada kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, debitur kehilangan haknya untuk mengalihkan atau mengurus kekayaannya. Sedangkan pada penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tetap berwenang untuk melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama

---

<sup>46</sup>Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *op.cit.*, hal 32-33

dengan pengurus yang diangkat oleh Pengadilan Niaga, dan dibawah pengawasan Hakim pengawas.

**b. Persyaratan Permohonan PKPU**

Untuk dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 212, hanya dapat dilakukan oleh debitur. Permohonan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan atas prakarsanya sendiri atau sebagai reaksi dari terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur (-krediturnya).

Sebagai kelengkapan dokumen untuk dipertimbangkan, maka pada saat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga, debitur wajib menyerahkan daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal para berpiutang, beserta jumlah piutang masing-masing mereka, dengan bukti-bukti selayaknya. (Pasal 212 ayat (1) UUK). Permohonan ini harus ditanda-tangani oleh debiturnya sendiri dan penasehat hukumnya.

dengan pengurus yang diangkat oleh Pengadilan Niaga, dan dibawah pengawasan Hakim pengawas.

**b. Persyaratan Permohonan PKPU**

Untuk dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 212, hanya dapat dilakukan oleh debitur. Permohonan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan atas prakarsanya sendiri atau atau sebagai reaksi dari terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur (-krediturnya).

Sebagai kelengkapan dokumen untuk dipertimbangkan, maka pada saat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga, debitur wajib menyerahkan daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal para berpiutang, beserta jumlah piutang masing-masing mereka, dengan bukti-bukti selayaknya. (Pasal 212 ayat (1) UUK). Permohonan ini harus ditanda-tangani oleh debiturnya sendiri dan penasehat hukumnya.

kewajiban pembayaran utang. Disamping itu untuk melaksanakan penundaan tersebut Pengadilan menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai Pengurus. Dalam hal permohonan PKPU, Pengadilan Niaga tidak berhak untuk menolak dan tidak boleh menilai kelayakan permohonan tersebut. Meskipun demikian, Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-undang tentang Kepailitan.

Dengan dikabulkannya permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka serta merta kekayaan debitur berada dibawah pengawasan pengurus. Sehingga tanpa persetujuan atau ikut sertanya pengurus, debitur tidak berwenang melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan berkenaan dengan kekayaannya. Debitur tidak dapat lagi bertindak sendiri atas suatu bagian kekayaannya. Adanya tindakan debitur atas kekayaannya yang tidak mendapatkan persetujuan atau ikut sertanya pengurus, pada



kewajiban pembayaran utang. Disamping itu untuk melaksanakan penundaan tersebut Pengadilan menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai Pengurus. Dalam hal permohonan PKPU, Pengadilan Niaga tidak berhak untuk menolak dan tidak boleh menilai kelayakan permohonan tersebut. Meskipun demikian, Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-undang tentang Kepailitan.

Dengan dikabulkannya permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka serta merta kekayaan debitur berada dibawah pengawasan pengurus. Sehingga tanpa persetujuan atau ikut sertanya pengurus, debitur tidak berwenang melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan berkenaan dengan kekayaannya. Debitur tidak dapat lagi bertindak sendiri atas suatu bagian kekayaannya. Adanya tindakan debitur atas kekayaannya yang tidak mendapatkan persetujuan atau ikut sertanya pengurus, pada

kreditur konkuren yang hadir atau diwakili dalam sidang tersebut. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, ketidakhadiran kreditur konkuren atau diwakili dalam sidang tidak mempengaruhi kuorum. Selain itu tidak hadirnya para kreditur (konkuren) tidak dapat ditafsirkan bahwa mereka tidak menyetujui pemberian PKPU. (Pasal 217 ayat (5) UUK).

Jangka waktu PKPU secara tetap tidak melebihi 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Sehubungan dengan jangka waktu ini, maka yang perlu diperhatikan adalah ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 217 A ayat (1) Undang-undang tentang Kepailitan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan :

“Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena debitur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan kepada Pengadilan, yang harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.”

Sebagai konsekuensi dari ketentuan diatas terhadap debitur yang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya secara tetap ditolak oleh kreditur konkuren, maka tidak ada lagi upaya hukum kasasi. Sebaliknya bila permohonan debitur disetujui oleh kreditur konkuren, maka kreditur konkuren yang tidak setuju juga tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Selain kedua implikasi tersebut, apabila Pengadilan Niaga menyatakan debitur pailit sebagai akibat kejadian sebagaimana dimaksud, maka putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam kepailitan, Undang-undang tentang Kepailitan telah mengintrodusir suatu lembaga baru, yaitu penangguhan hak eksekusi kreditur yang tagihannya dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (kreditur sparatist), hak pemilik barang yang berada dalam penguasaan debitur, dan hak kreditur yang diistimewakan.<sup>49</sup> Penangguhan ini berlaku sejak tanggal putusan penundaan sementara pembayaran utang ditetapkan.

---

<sup>49</sup>Pasal 56A Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Namun berbeda dengan kepailitan, dimana jangka waktu penangguhan dalam PKPU tidak terbatas dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, melainkan dapat berlaku selama berlangsungnya PKPU, yaitu dalam jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan sementara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan oleh Pengadilan.

Ketentuan penangguhan eksekusi seperti itu dengan maksud dan tujuan untuk menjaga agar kegiatan usaha debitur terus berlangsung. Hal ini diperlukan untuk memberikan dukungan terhadap putusan PKPU. Sehingga penetapan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU menjadi bermanfaat atau tidak sia-sia bagi debitur. Ketentuan ini tidak diatur dalam peraturan kepailitan yang lama, akibatnya putusan PKPU menjadi tidak berguna, karena debitur tetap tidak dapat diselamatkan.<sup>50</sup>

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, tetapi juga untuk kepentingan kreditur (-krediturnya). Dalam hal ini

---

<sup>50</sup>Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal. 78-79

selain Pasal 240 Undang-undang tentang Kepailitan mengatur beberapa hal/keadaan yang dapat mengakhiri PKPU, baik atas permintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus, atau satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan Sendiri. Adapun hal atau keadaan tersebut adalah :

- 1). debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- 2). debitur mencoba merugikan para krediturnya;
- 3). debitur melakukan perbuatan pengurusan atau pengalihan suatu bagian atas kekayaannya tanpa mendapat persetujuan pengurusnya terlebih dahulu;
- 4). debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
- 5). Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan

dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang;

atau

- 6). Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

Karena terjadinya hal-hal tersebut, jika Pengadilan menetapkan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu dan pula dapat meringankan debitur, sesungguhnya dalam Undang-undang tentang Kepailitan juga diaturnya upaya 'perdamaian.' Lembaga ini dapat dipakai untuk melakukan restrukturisasi utang, khususnya yang menyangkut tata cara, waktu dan jumlah utang yang akan dibayar oleh debitur kepada kreditur (-krediturnya).<sup>51</sup>

Mengenai jumlah utang yang harus dibayar, undang-undang memberikan teloransi kepada debitur untuk tidak membayar seluruh utangnya kepada kreditur konkuren, dapat

---

<sup>51</sup>Lebih jauh baca Elijana, "Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Permohonan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang," dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., *op.cit.*, 271-276

membayar sebagian dari utangnya saja. Untuk pelaksanaan hal itu, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian sewaktu-waktu selama berlangsungnya PKPU atau 270 (dua ratus tujuh puluh hari) terhitung sejak penundaan sementara pembayaran utang ditetapkan.

Apabila putusan tentang pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka 'perdamaian' mengikat semua kreditur konkuren tanpa kecuali, baik mereka yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Bahkan mengikat pula kreditur yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang penentuan perdamaian. Selain itu, dengan berakhirnya PKPU karena putusan tentang pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terangkat pula penangguhan hak-hak kreditur seperatist.

Dengan demikian, di samping penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU itu sendiri – untuk menghindari terjadinya kepailitan, juga dapat dilakukan dengan upaya 'perdamaian.' Yang mana debitur dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi atas utang (-utangnya). Adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya perdamaian seperti

itu, tentunya juga akan sangat bermanfaat dalam upaya menyelamatkan debitur dari kepailitan.

### **C. Manfaat PKPU Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan**

#### **1. Manfaat Dilihat Dari Sisi Ekonomi**

Sebagaimana telah diketahui bahwa lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Sehingga apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka perusahaan (debitur) akan terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan kegiatannya. Keadaan seperti ini secara ekonomi akan sangat menguntungkan, yaitu antara lain:

- a. Debitur melanjutkan usahanya;
- b. Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- c. Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan.
- d. Kreditur akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitur.

Selain itu, perusahaan tersebut tetap akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, baik itu melalui



pembayaran pajak, sebagai tempat lapangan kerja, maupun kedudukannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, apabila ada permohonan kepailitan bersamaan dengan PKPU, maka Pengadilan harus segera memutus penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Hal ini dimaksudkan pihak yang dimohon kepailitan (debitur) diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian untuk membayar seluruh atau sebagian dari utang-utangnya, agar terhindar dari kepailitan.

## 2. Manfaat Dilihat dari Sisi Sosial

Disamping manfaat ekonomi diatas, lembaga PKPU juga memiliki manfaat sosial, yaitu antara lain :

- a. bahwa dengan dikabulkannya PKPU secara tetap dan tercapai perdamaian antara debitur dan kreditur, maka debitur akan tetap melanjutkan kegiatannya. Keadaan ini tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi debitur dalam kedudukannya di masyarakat;
- b. selain itu juga dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai

---

<sup>52</sup>Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, hal. 2-39

kontribusi di bidang sosial, seperti memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olah raga, kesenian dan lain sebagainya.

### **3. Manfaat Dilihat Dari Sisi Yuridis**

Dengan dinyatakan pailitnya debitur, maka setelah mendengar dari Hakim Pengawas, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya si-pailit (debitur) dimasukkan dalam tahanan, baik dalam penjara untuk menahan orang-orang terdakwa, baik dalam rumah si-pailit sendiri, di bawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum (Pasal 84 UU Kepailitan).

Selain itu, selama kepailitan tak bolehlah si-pailit meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin Hakim Pengawas (pasal 88 UU Kepailitan).

Sementara dalam kaitannya kekayaan, dengan dinyatakan pailit, maka debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhdap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya (Pasal 22 Kepailitan).

Melihat akibat pernyataan pailit seperti antara lain tersebut diatas, maka dengan adanya lembaga PKPU debitur yang mendapat putusan PKPU secara tetap akan terhindar dari konsekuensi hukum tersebut. Sehingga hal ini akan sangat menguntungkan bagi debitur secara yuridis.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara-perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

#### **A.1. Alasan debitor mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Mencegah Kapailitan**

Pengajuan PKPU oleh debitor setidaknya-tidaknya mempunyai tiga alasan, yaitu

##### **a. Sebagai upaya mencegah kepailitan**

Suatu alternatif cara bagi para kreditor dalam memperoleh kembali piuangnya adalah melalui pengajuan permasalahan kepailitan di Pengadilan Niaga. Dengan proses kepailitan akan ditempuh penyelesaian utang melalui eksekusi massal terhadap harta debitor yang hasilnya akan

dibagikan kepailitan tersebut secara yuridis debitor diberi kesempatan untuk menyelesaikan utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang jika dalam tempo waktu penundaan tersebut debitor gagal mencapai perdamaian atau perdamaian dibatalkan, maka berlakukan ketentuan pailit atas debitor.

Dari data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana termuat dalam register perkara kepailitan dan PKPU diperoleh fakta tanggapan debitor atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya yang pada pokoknya mengandung dua pilihan 1) Debitor menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh para kreditornya atau, 2) Debitor menggunakan tangkisan dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pilihan pertama tidak dimaksudkan untuk mencegah kepailitan sehingga tidak akan dibahas. Sebaliknya tangkisan yang diajukan debitor ditujukan untuk mencegah kepailitan adalah dengan cara mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan PKPU dibuat

secara tertulis dengan permohonan pada pokoknya agar debitor diberi tempo waktu untuk menunda pembayaran utangnya yang disertai atau tanpa atau proposal perdamaian. Dari data permohonan Penundaan Kwajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh debitor dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>53</sup>

(1) Dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Permohonan PKPU mengemukakan alasan-alasan antara sebagai berikut :

- (a) Pengajuan permohonan PKPU atas dasar permohonan kepailitan yang diajukan kreditor;
- (b) Permohonan PKPU masih mempunyai aset dan menunjukkan kemampuan material untuk dibayarkan pada kreditor konkuren;
- (c) Permohonan menawarkan kepada kreditor atas aset-aset perusahaan baik melalui konversi saham ataupun kompensasi Transforable Mempership Certificate (TMC);

---

<sup>53</sup>Periksa Permohonan *PT. Karahha Digdaya* tertanggal 14 September 1998

- (d) Pemohon PKPU mempunyai buruh sebanyak 500 orang yang patut diperhatikan nasibnya;
  - (e) Pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena itu merasa perlu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan proposal rencana perdamaian akan segera disusulkan.
- (2) Dalam Perkara No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Permohonan PKPU mengemukakan alasan-alasan antara sebagai berikut :<sup>54</sup>
- (a) Pengajuan permohonan PKPU atas dasar permohonan kepailitan yang diajukan kreditor;
  - (b) Pemohon PKPU mempunyai utang kepada American Express Bank Lts Cabang Jakarta disamping kreditor-kreditor lainnya;
  - (c) Pemohonan PKPU masih terlihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan

---

<sup>54</sup>Periksa Permohonan *PT. Dadomas Abadi Tbk.* Tertanggal 17 September 1998

hutangnya dan kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada kreditor masih tetap ada bila dilihat dari aset serta aktivitas perusahaan;

(d) Pemohon PKPU juga melampirkan proposal perdamaian kepada para kreditor yang pada dasarnya berisikan :

- Usulan pembayaran utang pokok;
- Usulan pembayaran bunga;
- Usulan penyelesaian kewajiban kepada kreditor

(3) Dalam Perkaran No. 03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Permohonan PKPU mengemukakan alasan-alasan antara sebagai berikut :<sup>55</sup>

- (a) Pemohon adalah perusahaan pembinaan yang melaukkan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, pembiaan konsumen dan kartu kredit;
- (b) Pemohon mempunyai utang kepada kreditor-kreditor, selain itu pemohon juga mempunyai piutang kepada para debitor;

---

<sup>55</sup>Periksa Permohonan *PT. Ometraco Multi Artha* tertanggal 16 September 1998.



- (c) Utang pemohon kepada kreditornya adalah dalam mata uang dollar USA yang dijadi modal kerja oleh pemohon berfluktuasi terhadap mata uang rupiah telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perusahaan pemohon;
  - (d) Pemohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian pemohon sedang mempersiapkan rencana perdamaian untuk diajukan kepada para kreditor konkuren.
- (4) Dalam Perkaratan No.04.a/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Permohonan PKPU mengemukakan alasan-alasan antara sebagai berikut :<sup>56</sup>
- (a) Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan telah diajukan permohonan kepailitan oleh pihak kreditor.
  - (b) Pemohon mengakui mempunyai utang kepada para kreditornya, namun jumlahnya perlu diverifikasi;

---

<sup>56</sup>Periksa Permohonan *PT. Indramayu Lestari* tertanggal 7 oktober 1998

- (c) Pemohon masih mempunyai aset perusahaan dengan demikian membuktikan bahwa pemohon masih mempunyai kemampuan material untuk ditawarkan kepada kreditor prefent dan kreditor konkuren;
  - (d) Pemohon saat ini tidak melakukan pembayaran utang-utangnya, maka pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sedangkan proposal perdamaian akan disusulkan.
- (5) Dalam Perkaratan No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Permohonan PKPU mengemukakan alasan-alasan antara sebagai berikut :<sup>57</sup>
- (a) Pemohon mengajukan PKPU sebagai reaksi atas pengajuan permohonan kepailitan dari kreditor;
  - (b) Pemohon mempunyai aset pribadi yang real;
  - (c) Saat ini usaha dari pemohon tidak berjalan dengan baik yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan;

---

<sup>57</sup>Periksa Permohonan H. Moch. Taufik STK tertanggal 15 Desember 1998

(d) Pemohon menawarkan rencanan perdamaian, dan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, karena itu merasa perlu mengajukan permohonan PKPU.

(6) Dalam Perkaran No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Permohonan PKPU mengemukakan alasan-alasan antara sebagai berikut :<sup>58</sup>

(a) Pemohon mengajukan PKPU atas alasan bahwa termohon telah mengajukan permohonan kepailitan;

(b) Gejolak moneter di Indonesia mengakibatkan nilai tukar rupiah mengalami depresi yang sangat tajam terhadap mata uang dollar USA, sehingga pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan;

(c) Pemohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

(d) Namun demikian, pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan untuk melanjutkan usahanya

---

<sup>58</sup>Periksa Permohonan *PT. Bopoiling Lestari* tertanggal 14 Desember 1998

dengan baik bilamana diberikan tenggang waktu untuk melakukan penundaan pembayaran kepada para kreditor;

- (e) Disamping itu pernyataan pailit mempunyai akibat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan pemohon;
  - (f) Pemohon PKPU akan segera menyerahkan proposal rencana perdamaian kepada para kreditor.
- (7) Dalam Perkaran No. 09/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Permohonan PKPU mengemukakan alasan-alasan antara sebagai berikut :<sup>59</sup>
- (a) Pemohon mengajukan permohonan PKPU dengan alasan telah dimohonkan pailit oleh pemohon;
  - (b) Bahwa termohon adalah salah satu kreditor disamping kreditor kreditor lainnya;
  - (c) Pemohon masih mempunyai aset dan beberapa aset telah ditawarkan kepada kreditor-kreditor konkuren;
  - (d) Beberapa kreditor konkuren telah menyetujui

---

<sup>59</sup>Periksa Permohonan *PT. Perdana Multi Pinance* tertanggal 21 Desember 1998

penyelesaian utang secara restructuring maupun dengan negosiasi.

(8) Dalam Perkaran No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Permohonan PKPU mengemukakan alasan-alasan antara sebagai berikut :<sup>60</sup>

- (a) Permohonan dimajukan atas dasar permohonan kepailitan dari kreditor;
- (b) Pemohon PKPU adalah perusahaan yang bergerak di bidang multi pembayaran. Yaitu Consumers Finance, Leasing, Factoring
- (c) Bahwa tagihan termohon kepada pemohon adalah utang pokok dan bunganya, disamping itu masih mempunyai kreditor-kreditor konkuren;
- (d) Utang pemohon kepada para kreditor telah jatuh tempo;
- (e) Utang pemohon kepada para kreditor dalam bentuk mata uang dollar USA, dan akibat gejolak moneter mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah telah

---

<sup>60</sup>Periksa Permohonan *PT. Bringin Indonesia Sejahtera* tertanggal 21 Desember 1998

memberi pengaruh yang tidak menguntungkan dan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya;

- (f) Oleh karena itu, pemohon mengajukan penundaan pembayaran dan proposal rencana perdamaian akan segera disusulkan.

Bertitik tolak dari pemohon PKPU tersebut diatas, maka permohonan PKPU pada umumnya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh para kreditornya.
- (2) Pemohon PKPU mengakui mempunyai utang kepada para kreditor.
- (3) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- (4) Pemohon tidak mampu melanjutkan pembayaran karena sedang mengalami kesulitan keuangan sebagai dampak krisis moneter.
- (5) Pemohon masih mempunyai aset dan akan mengajukan proposal perdamaian dalam rangka mengatasi permasalahan utang dengan para kreditornya.

Setelah Pengadilan Niaga memeriksa perkara permohonan tersebut, pada pokoknya Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU dari debitor. Pada umumnya hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa permohonan PKPU yang diajukan dengan permohonan kepailitan maka pemeriksaan PKPU didahulukan dan berdasarkan ketentuan pasal 217 ayat 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Permohonan Kepailitan harus dikesampingkan.

**b. Debitur tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha.**

Suatu permohonan PKPU mempunyai tujuan mencegah kepailitan. Pemohon PKPU berusaha mencegah sarana hukum yang diupayakan oleh kreditor-debitornya dengan mengajukan PKPU, yaitu dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Niaga. Salah satu isi dari dalil pemohon tersebut antara lain, debitor mengemukakan masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya. Dalam perkara lainnya antara lain pemohon mengemukakan masih mempunyai kemampuan ia masih

mempunyai kemampuan finansial berupa asset yang dapat ditawarkan untuk membayar utang.

Permohonan PKPU akan mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Niaga dan tentang hal tersebut akan disajikan data pertimbangan Pengadilan Niaga yang memberikan penundaan kewajiban sementara pembayaran utang.

(1) Dalam Perkara No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, antara lain dipertimbangkan :

“..... Pengadilan melihat masih ada kemungkinan untuk melunasi kewajiban bila diberi tenggang waktu yang tetap.”

(2) Dalam Perkara No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, antara lain dipertimbangkan :

“..... Pengadilan melihat masih ada kemungkinan adanya permasalahan dapat dijalankan apabila tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya.”

(3) Dalam Perkara No. 09/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, antara lain dipertimbangkan :



“..... Pengadilan beralasan memuat hukum untuk memberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren.”

(4) Dalam Perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, antara lain dipertimbangkan :

“..... Pengadilan melihat permohonan mempunyai kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya.”

Dari data tersebut, maka dapat dikatakan pertimbangan pengadilan Niaga mengacu kepada prospek kelangsungan usaha. Debitor akan tetap melangsungkan usaha dan kemungkinan menyelesaikan permasalahan utang-utang.

#### **c. PKPU Mempunyai Manfaat Waktu, Ekonomis Dan Yuridis**

Dari sisi kepentingan kreditor dan debitor, PKPU mempunyai manfaat waktu, manfaat ekonomis dan manfaat yuridis. Berdasarkan data penelitian terhadap perkara permohonan kepailitan yang dimohonkan PKPU membawa dampak positif bagi debitor dan para kreditornya.

Manfaat efisiensi waktu terutama diperoleh oleh para kreditur hal ini sesuai data sample perkara permohonan PKPU No. 01/PKPU/1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst dan No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dalam Perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, permohonan PKPU diajukan pada tanggal 14 September 1998 dan berlaku efektif menyelesaikan utang pada tanggal 25 Januari 1999 (satu bulan setelah homologasi). Sedangkan dalam Perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/ Jkt.Pst, Permohonan diajukan tanggal 21 Desember 1998 dan penyelesaian utang secara final terhitung sejak tanggal 19 Mei 1999.

Selain manfaat efisien waktu dalam PKPU juga mengandung manfaat efisiensi ekonomis, yaitu dengan biaya yang hemat kreditor dapat memperoleh kepastian pengembalian pinjaman (piutang). Debitor terhindar dari kepailitan yang berarti secara ekonomis menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan apabila ia akan mendirikan perusahaan baru setelah di dihabilitasi dari kepailitan

Manfaat secara yuridis praktis akan mengembangkan lembaga PKPU dan kepailitan melalui praktek-praktek dan putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dengan terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 1998 begitu pesat perkembangan praktek di bidang hukum kepailitan

**A.2. Tingkat Keberhasilan Debitor Mencegah Kepailitan Melalui Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).**

Ada 4 (empat) kemungkinan keberhasilan debitor dalam mempergunakan sarana hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam penyelesaian utang :

**a. Debitor terhindar dari kepailitan sebagai akibat dari tercapainya perjanjian di bawah tangan.**

Dari data di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperoleh fakta perkara PKPU yang akhirnya menyelesaikan permasalahan utang dengan tercapainya perjanjian di bawah tangan tersebut dapat dilihat dari proses perkara No. 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. dan. 08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo

No.05/PKPU/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang dapat digambarkan duduk perkaranya sebagai berikut :

(1) Perkara No. 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No. 02/PKPU/1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst.

- Pemohon PKPU adalah PT. Davomas Abadi Tbk.
- Permohonan PKPU telah dimohon pailit oleh American Express Bank Ltd di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- Bahwa American Bank Express Bank Ltd mempunyai tagihan terhadap pemohon PKPU sebesar US\$ 3.000.000,-
- Bahwa pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran kepada kreditor masih tetap ada bila dilihat dari asset dan laporan keuangan serta aktivitas perdamaian kepada kreditor yang berisikan antara lain sebagai berikut :
  1. Usulan pembayaran utang pokok
  2. Usulan pembayaran bunga

3. Ringkasan usulan penyelesaian kewajiban kepada kreditor

- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada hari Senin 28 September 1998 Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan pemohon.
- Bahwa pemohon PKPU diberi penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan catatan registrasi perkara permohonan PKPU tahun 1998 perkara ini dinyatakan dicabut/gugur karena kedua belah pihak telah melakukan perdamaian diluar pengadilan.

(2) Perkaran No. 08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.05/PKPU/1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst. yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pemohon PKPU adalah PT. Bajamarga Kharisma Utama
- Bahwa dengan putusan Pengadilan Niaga No. 05/PKPU/1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst. pada tanggal 22 Oktober 1998 yang pada pokoknya mengabulkan

permohonan Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

- Bahwa dalam tenggang waktu penundaan sementara tersebut pihak debitor telah melakukan perdamaian di luar prosedur PKPU.
- Bahwa kemudian debitor telah mengajukan pencabutan permohonan/penundaan kewajiban pembayaran utang dengan suratnya tertanggal 04 Desember 1998 dan kreditor mencabut pula permohonan pailit dengan surat tanggal 01 Desember 1998.
- Menyikapi permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan Niaga pada pokoknya mempertimbangkan bahwa perkara permohonan PKPU dan permohonan Pailit menjadi tidak lagi mempunyai dasar hukum karena substansinya telah dicabut oleh pemohon, sedangkan termohon maupun para kreditor lainnya menyetujui pencabutan tersebut, sehingga tidak terdapat alasan untuk melanjutkan pemeriksaan menurut prosedur

perundang-undangan C.q. Undang-Undang No. 4 tahun 1998.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan gugur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

**b. Debitor terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhinya perjanjian perdamaian**

Dari putusan-putusan PKPU dapat diambil sample putusan yang berhasil mencegah kepailitan dan tercapai perjanjian perdamaian di bawah ini dipaparkan 2 (dua) perkara, yaitu perkara No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga/ Jkt.Pst jo No.01/PKPU/1998/PN.Niaga /Jkt.Pst. dan Perkara No. 21/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.10/ PKPU/1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst.

(1) Perkara No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.01/PKPU/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pemohon adalah PT. Karaba Digdaya yang mengajukan PKPU oleh sebab permohonan dari

kreditornya PT. Jaya Abayashi dan PT. Nusa Raya Cipta.

- Bahwa Pemohon mengakui mempunyai utang sebesar Rp. 15.39.070.659,- tetapi belum diverifikasi.
- Bahwa pemohon PKPU mempunyai asset sebesar Rp. 539.630.180.390,-
- Bahwa pemohon PKPU mempunyai buruh sebanyak  $\pm$  500 orang yang patut diperhatikan nasibnya.
- Bahwa yang dapat ditawarkan pada kreditor-kreditor adalah :
  - a) Saham
  - b) TMC (Transferable Membership Certificate)
  - c) Tanah matang
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga antara lain mempertimbangkan bahwa dengan diajukannya permohonan PKPU dan kelanjutan rencana perdamaian pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang,



sehingga pengadilan Niaga mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

- Selanjutnya dalam rapat kreditor tanggal 7 Mei 1999, rencana perdamaian antar pemohon dengan termohon lainnya telah disetujui.

Isi perjanjian perdamaian antara pemohon PKPU dengan termohon PKPU dengan kreditor lainnya disahkan pada tanggal 25 Mei 1999 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada pokoknya utang kepada seluruh kreditor akan dibayar dalam bentuk penyerahan Transferable Membership Certificate (TMC) Emerald Golf, saham dan uang tunai yang akan diselesaikan dalam tempo I (satu) bulan setelah perdamaian *dihomologasi* oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(2) Perkara No. 21/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.10/PKPU/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. pada pokoknya dapat digambarkan sebagai berikut

- Pemohon PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance yang diajukan permohonan pailit oleh AB Capital Markets (HR) Ltd dan kawan-kawan

- Bahwa pemohon mempunyai hutang pokok dan bunga kepada termohon
- Bahwa utang pemohon kepada kreditor-kreditor sebagian besar dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
- Bahwa dalam rapat para kreditor tanggal 5 Mei 1999 ternyata rencana damai yang diajukan oleh debitor telah disetujui oleh para kreditor dengan perbandingan suara 70,78% setuju dan 27,34% tidak setuju.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Hakim Pengawas atas besarnya tagihan dari jumlah suara yang setuju diperoleh perbandingan yang jumlah tersebut mewakili lebih dari 2/3 total tagihan. Karenanya berdasarkan pasal 269 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 Pengadilan Niaga wajib memberikan pengesahan atas perdamaian tersebut.
- Pada tanggal 19 Mei 1999 perdamaian antara debitor dan para kreditornya disahkan pengadilan Niaga.
- Bahwa penyelesaian ini bersifat final

**c. Debitor pailit sebagai akibat gagal tercapainya perjanjian perdamaian**

Dari data putusan perkara PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan dipaparkan dua perkara PKPU yang ditolak karena gagal tercapai perdamaian, yaitu perkara No. 09/Pailit/1998/PN.Niaga/ Jkt.Pst dan No. 08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst

(1) Perkara No. 09/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.046/PKPU/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara lain memuat fakta dan pertimbangan-pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah PT. Indramaju Lestari dan diajukan permohonan kepailitan oleh PT. LUKINDO TECHNICS.
- Bahwa jumlah tagihan yang dimohonkan adalah sebesar Rp. 123.237.754,- ditambah US\$ 444,441 sedangkan menurut pemohon sebesar Rp. 2.449.110.843,-

- Bahwa nilai asset pemohon PKPU berdasarkan penilaian dari appraisal profesional PT. MITRA SELARAT ABADI KONSULINDO.
- Bahwa pengadilan niat telah mengabulkan permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dengan putusan No. 04/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 1998.
- Bahwa pemohon (debitor) telah mengajukan proposal rencana perdamaian tertanggal 06 November 1998.
- Bahwa berdasarkan laporan di persidangan pada tanggal 26 Nopember 1998 oleh Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor maupun kreditor tidak tercapai adanya perdamaian sebagaimana permintaan debitor.
- Bahwa sampai saat yang ditentukan belum tercapai persetujuan perdamaian serta pengurus sudah memberitahukan keapda pengadilan maka berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 debitor harus dinyatakan akan pailit.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 275 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 maka semua unsur telah terpenuhi yakni berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
  - b. Bahwa adanya utang debitor terbukti dengan adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohonan PKPU yang sebelumnya didahului adanya permohonan Kepailitan oleh Kreditor PT. LUKINDO TECHNICS.
  - c. Bahwa utang debitor (pemohon) tidak dapat dibayar dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- Bahwa akhirnya Pengadilan Niaga memutuskan antara lain sebagai berikut :
  - a. Menolak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon
  - b. Menyatakan bahwa PT. INDRAMAJU LESTARI berkantor di Komplek Ruko Electronic Centre, Agung Sedayu Blok L-6 Mangga Dua-Raya Jakarta 10730, Pailit.

(2) Perkara No. 22/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.08/PKPU/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara lain memuat fakta dan pertimbangan-pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah PT. BORPILING LESTARI mengajukan PKPU dengan adalah telah dimohon pailit oleh PT. JAYA READYMIX
- Bahwa pemohon mengakui mempunyai utang kepada termohon dan pemohon tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Pemohon mengemukakan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang sangat tajam terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat.
- Bahwa masih terdapat kemungkinan pemohon menjalankan usahanya dengan baik bilamana diberikan tenggang waktu untuk melakukan penundaan pembayaran kewajiban kepada kreditor-krediturnya

- Bahwa debitur mempunyai tenaga kerja dengan dinyatakan pailit perusahaan dengan sendirinya mempunyai akibat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang berdampak penambahan jumlah pengangguran.
- Setelah melalui pemeriksaan di Pengadilan Negeri, akhirnya debitor diberi penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, debitor dan kreditor-kreditor belum tercapai perdamaian, maka debitor dinyatakan pailit.

**d. Debitur pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.**

Dari data putusan perkara PKPU di Pengadilan Niaga tahun 1998, terdapat dua perkara yang telah mencapai perdamaian tetapi belakangan dinyatakan batal dan debitor dalam keadaan pailit.

Dua perkara tersebut sebagaimana diputuskan dalam perkara No. 17/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.06/PKPU/1998/PN.Niaga/ Jkt.Pst. dan

No.20/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.07/PKPU/  
1998/PN. Niaga/Jkt.Pst.

(1)Perkara No. 17/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No.  
08/PKPU/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. dapat digambarkan  
sebagai berikut :

- Pemohon PKPU adalah PT. Perusahaan Pelayanan Angkutan Pertambangan yang diajukan permohonan pailit oleh PT. Daya Radar Utama
- Bahwa pemohon mengakui utang kepada termohon akan tetapi tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- Bahwa pemohon mengemukakan adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang.
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 7 Desember 1998, pemohon diberi penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.



- Bahwa pada tanggal 7 Januari 1999 telah ditandatangani Akte Perdamaian.
- Bahwa perdamaian tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 14 Januari 1999.
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No. 01/ Pembatalan Perdamaian/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst perdamaian antara debitur dan kreditornya dibatalkan pada tanggal 30 September 1999.
- Pemohon PKPU mengajukan kasasi atas pembatalan perdamaian.
- Bahwa berdasarkan putusan No. 038/K/N/1999 tanggal 17 Nopember 1999 permohonan kasasi dari pemohon PKPU ditolak.
- Bahwa selanjutnya pemohon PKPU mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
- Bahwa berdasarkan peninjauan kembali No. 03 PK/N/2000 tanggal 28 Pebruari 2000, permohonan peninjauan kembali dari pemohon PKPU (debitor) dinyatakan ditolak.

- Bahwa dengan demikian pemohon PKPU dinyatakan pailit.

(2) Perkara No. 20/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst jo No. 07/PKPU/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pemohon adalah H. Moch. Taufik, STK yang diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dipailitkan oleh Lippo Bank Cs.
- Bahwa pemohon mengakui mempunyai utang tetapi jumlahnya belum diderifikasi.
- Bahwa pemohon mempunyai asset sebesar Rp. 500.000.000,- dan beberapa bidang tanah.
- Bahwa pemohon menyampaikan usahanya tidak berjalan dengan baik.
- Bahwa pemohon akan menawarkan rencana perdamaian pada kreditor-kreditornya.
- Pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- Pengadilan Niaga menilai terdapat cukup alasan untuk memberikan PKPU sementara kepada pemohon.
- Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tertanggal 18 Desember 1998 debitor diberi penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
- Pada tanggal 29 Januari 1999 telah ditanda tangani akter perdamaian oleh debitor dan para kreditornya dan oleh Pengadilan Niaga, perdamaian tersebut telah disahkan.
- Para kreditor telah mengajukan pembatalan perdamaian akibat tidak dipenuhinya isi perdamaian.
- Pada tanggal 8 Maret 1999 telah dinyatakan batal perjanjian perdamaian berikut akte pengesahan perdamaian tertanggal 29 Januari 1999 dan dibitur dinyatakan pailit.

Untuk memberikan ilustrasi tingkat keberhasilan Pemohon PKPU dalam mencegah kepailitan akan disajikan data dengan sample putusan-putusan PKPU sementara Tahun 1998 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Perkara yang diputus PKPU  
Sementara

Jumlah Permohonan PKPU	Putus	Sisa
11	10	1

Tabel 2 : Jumlah Perkara Yang Dikabulkan  
Penundaan Sementara Kewajiban  
Pembayaran Utang.

No	Nomor Permohonan
1.	No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
2.	No. 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
3.	No. 04/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
4.	No. 09/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 04/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
5.	No. 08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 05/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
6.	No. 17/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst

7.	No. 20/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
8.	No. 22/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
9.	No. 23/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 09/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
10.	No. 21/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst

Tabel 3 : Daftar Perkara Yang Memperoleh PKPU

Tetap dan Mengesahkan Perdamaian

No	PKPU Tetap dan Mensahkan Perdamaian	Prosentase
1.	No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	20%
2.	No. 21/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	

Tabel 4 : Daftar Perkara Yang Mengesahkan  
Perdamaian dan Berakhir Dengan  
Pembatalan Perdamaian

No	PKPU Sementara Yang Mengesahkan Perdamianan dan Berakhir Dengan Pembatalan Perdamaian	Prosentase
1.	No. 17/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	20%
2.	No. 20/Pailit/1998PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	

Tabel 5 : Daftar Perkara Yang Penundaan  
Pembayaran Secara Tetap Ditolak dan  
Berakhir Pailit

No	PKPU Tetap Tolak dan Berakhir Pailit	Prosentase
1.	No. 04/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	20%
2.	No. 09/Pailit/1998PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 04/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	

3	No. 22/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	
4	No. 23/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 09/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	

Tabel 6 : Daftar Perkara Yang Dinyatakan Gugur

No	PKPU Yang Dinyatakan Gugur	Prosentase
1.	No. 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	20%
2.	No. 08/Pailit/1998PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 05/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst	

### A.3. Efektivitas PKPU Dalam Mencegah Kepailitan

#### a. Substansi (isi) Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU

PKPU yang diberikan kepada Pemohon (debitur) dengan tujuan menyelesaikan utang piutang dengan para krediturnya melalui proses PKPU kedua belah pihak akan membuat perjanjian perdamaian dengan didahului usulan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur. Dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh isi perjanjian perdamaian itu. Bertitik

tolak dari hal tersebut akan disajikan data isi perjanjian perdamaian dalam perkara PKPU antara lain No. 01 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / jkt. Pst; No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/jkt.Pst; No. 07 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / jkt.Pst; dan No.10/PKPU/1998/PN.Niaga/jkt.Pst; sebagai berikut :

**1) Isi perjanjian perdamaian perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga Jakarta Pusat.<sup>61</sup>**

Bahwa rencana perdamaian antara pemohon dengan termohon dan kreditur lainnya yang telah disetujui pada tanggal 17 Mei 1999 dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahwa utang kepada seluruh kreditur akan dibayar dalam bentuk penyerahan Transferable Membership Certificate (TMC) Emeralda Golf, saham dan uang tunai sebagai berikut :

No	Nama	REALISASI PEMBAYARAN			Keterangan
		KOMPENSASI TMC		Tunai (Rp.)	
		Nilai	Jml TMC		
1.	PT. LIPPO	233.037.844.789,-			
	PT. BII				

<sup>61</sup>Periksa *Putusan Pengadilan Niaga* No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/ Jkt.Pst, Jo No. 01/Pailit/1998/ PN. Niaga/Jkt.Pst tertanggal 25 Mei 1998.



2.	PT. Jaya Obayashi/ PT.NRC	14.830.277.388,-	263 unit		PPN sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3.	PT. Dacrea	91.470.727,-	1 unit		
4.	PT. Bayulincir Ardyatama			34.366.119,-	
5.	PT. Bakti Sentana Suri Teladan	79.525.305,-	1 unit		
6	PT. Sinar Mitra Mulia	54.331.691,-			
7	PT. Grahacara Dutapraja	544.500.000,-	9 unit	98.352.895,-	
8	PT. Thess Contractor Indonesia			31.095.760,-	

9	PT. Netra Leksana Dipta			20.700.000,-	
10	PT. Delameta Bilano	121.000.000,-	2 unit	18.389.592,-	
11	Asikin, Cs.	251.900.000,-	4 unit		
12	Kirom			35.120.000,-	
13	Saniyanto/ Parno	60.500.000,-	1 unit		Kreditur tambah uang Rp.5.500.000,-
14	Biro Jasa Budi Susilo	320.000.000,-	5 unit		
15	CCA Manage- ment BV	320.500.000,-	6 unit	57.630.180,- + US\$ 1.180,-	
16	PT. Swakarya Permata Jaya			41.309.900,-	

17	KPMG Hanadi Suyendro & rekan				Dibatalkan berdasarkan surat Suyendro & rekan, bulan 4'99
18	Golden Bear	US\$ 150.147,79	22 unit		Kreditur tidak memberi tanggapan
19	Klages Carter Vail & Part	US\$ 25.742,12	3 unit		Kreditur tidak memberi tanggapan
20	PT. Entopos Indonesia	US\$ 90.287,97	14 unit		PPN akan dibayar tunai oleh debitur ke kas negara melalui kreditur PPh dibayar oleh Kreditur.
21	PT. Bumi Upaya Griya (Bp. Tjandra)	242.000.000,-	4 unit		
22	PT. Astrindo	121.000.000,-	2 unit		

23	PT. Bank Universal	2.324.470.794,40	39 unit		Tanah akan dikembalikan oleh kreditur kepada debitur dan jumlah utang akan dikurangi dengan angsuran yang masih dibayar.
----	--------------------	------------------	---------	--	--

Keterangan :

- (1) Utang pada kreditur-kreditur dibawah Rp. 50.000.000,- akan dibayar tunai;
- (2) Utang diatas Rp. 50.000.000,- akan tetapi dibawah Rp. 400.000.000,- akan dibayar dengan penyerahan sejumlah TMC, dengan harga minimum @ Rp. 60.500.000,-0 (termasuk pajak);
- (3) Utang diatas Rp. 400.000.000,- akan tetapi dibawah Rp. 700.000.000,- dibayar uang tunai sekitar 15 s/d 20% bagian dan sisanya dengan penyerahan 80 s/d 85% bagian dengan TMC dengan harga minimum @ Rp. 60.500.000,- (termasuk pajak);

- (4) Utang diatas Rp. 700.000.000,- akan tetapi dibawah Rp. 200.000.000,- dibayar dengan penyerahan 100% TMC dengan harga minimum @ Rp. 60.000.000,- (termasuk pajak);
- (5) Utang diatas Rp. 20.000.000,- dibayar dengan penyerahan saham PT. Karabha Digdaya, tetapi dengan hak opsi pada debitur untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham tersebut dalam jangka waktu seelama 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima, dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian;

Fasilitas :

- (1) Pihak PT. Karbha Digdaya tidak akan menerbitkan TMC melebihi dari jumlah 2400 TMC selama jangka waktu 5 tahun terhitung dari akta perdamaian ini dihomologasi, untuk fasilitas 27 joles. Tujuannya agar menjamin kenyamanan pemegang TMC dan menjamin level harga TMC tetap tinggi;

- (2) Bahwa kepada setiap debitur yang pembayarannya tagihannya dilakukan TMC, dibebaskan membayar 1 kali biaya balik nama (Membership Transfer Fee) kepada perseroan;
- (3) Bahwa selama TMC tidak digunakan/diaktifkan, kepada pemegang saham TMC tidak dikenakan biaya aktiva dan biaya bulanan;
- (4) Tiap-tiap pembayaran yang dilakukan dengan TMC, jika masih ada kekurangan pembayara, akan dilakukan dengan cara tunai, kecuali kekurangan pembayaran tersebut telah diatur secara lain antara PT > KD dengan kreditur yang bersangkutan;
- (5) Bahwa apabila perusahaan dilikuidasi dalam waktu 2 tahun terhitung sejak rencana perdamaian ini dihomologasi, maka setiap pemegang TMC yang memperoleh haknya berdasarkan rencana perdamaian ini, haknya dipersamakan dengan kreditur konkuren atas sejumlah nilai konversi per TMC yang diterima, sepanjang TMC tersebut belum dialihkan kepada pihak lain;

Tempo Pelaksanaan :

Bahwa pembayaran baik berupa uang tunai atau penyerahan saham, maupun pembayaran berupa uang tunai, atau penyerahan saham, maupun pembayaran berupa TMC sebagaimana yang diuraikan pada butir IV di atas, akan diselesaikan dalam tempo 1 bulan setelah akta perdamaian ini dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

**2) Isi Perjanjian Perdamaian Perkara No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat<sup>62</sup>**

Perjanjian perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Akta perdamaian tanggal 7 Januari 1999 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

(1) Pada tanggal 11 April 1999 pemohon PKPU membayar pada para termohon PKPU sebagai berikut :

a. PT. Daya Radar Utama Rp. 349.246.388 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat

---

<sup>62</sup>Periksa *Putusan Pengadilan Niaga* No. 06/PKPU/1998 /PN.Niaga/Jkt.Pst, Jo No. 17/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst tertanggal 19 Januari 1999.

puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

- b. PT. Primacoat Lestari Rp. 6.392.850,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. PT. Kartini Utama Rp. 14.986.775,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
- d. PT. Wisnu Trading Co Rp. 11.302.775,- (sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

(2) Pada tanggal 11 Juli 1999 pemohon PKPU membayar pada para termohon PKPU sebagai berikut :

- a. PT. Daya Radar Utama Rp. 116.415.462,-
- b. PT. Primacoat Lestari Rp. 2.130.950,-
- c. PT. Kartini Utama Rp. 14.995.591,-
- d. PT. Wisnu Trading Co Rp. 116.415.462,-



(3) Pada tanggal 11 Oktober 1999 pemohon PKPU membayar pada para pemohon PKPU sebagai berikut :

- a. PT. Daya Radar Utama Rp. 116.415.462,-
- b. PT. Primacoat Lestari Rp. 2.130.950,-
- c. PT. Kartini Utama Rp. 14.995.591,-
- d. PT. Wisnu Trading Co Rp. 3.767.591,-

(4) Pada tanggal 11 Oktober 2000 pemohon PKPU membayar pada para pemohon PKPU sebagai berikut :

- a. PT. Daya Radar Utama Rp. 116.415.462,-
- b. PT. Primacoat Lestari Rp. 2.130.950,-
- c. PT. Kartini Utama Rp. 14.995.591,-
- d. PT. Wisnu Trading Co Rp. 3.767.591,-

(5) Pembayaran adalah tunai dan memakain tanda terima yang sah dari termohon PKPU;

(6) Apabila pemohon PKPU lalai membayar hutangnya sesuai dengan jadwal yang disebut pada salah satu butir 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, maka tanpa teguran lagi pemohon PKPU demi hukum sudah

terbukti melanggar perdamaian dan sehari sesudah kelalaian itu terjadi, maka pemohon PKPU menerima putusan Kepailitan yang diajukan oleh hakim Pengawas pada Majelis Perkara No: 17/PAILIT/1998/JKT.PST.

**3) Isi Perjanjian Perdamaian Perkara No: 07/Pailit/1998/Jkt.Pst.<sup>63</sup>**

Perjanjian perdamaian dituangkan dalam kesepakatan damai tertanggal 29 Januari 1999.

Selanjutnya para pihak menerangkan perjanjian perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Bahwa diantara pihak telah terjadi perselisihan yang dasarnya menyangkut masalah transaksi pembayaran kartu kredit sebagai berikut

Kreditur	No. Kartu	Total Tagihan
PT. Bank Papan Sejahtera, Tbk	4157-3695-0109-0007	Rp 15.000.000,-
	4599-2021-0000-5157	Rp 22.000.000,-
PT. Bank Niaga, Tbk	4568-7919-0096-2002	Rp 109.000.000,-
PT. Bank Lippo	5404-6218-0029-1001	Rp 56.000.000,-

<sup>63</sup>Periksa *Putusan Pengadilan Niaga* No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Jo No. 20/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 29 Januari 1999

PT. Sejahtera MBF	5481-4620-9151-1005	Rp 11.000.000,-
Multi Finance	5481-4620-5077-5005	Rp 14.500.000,-
PT. Bank Mashil Utama, Tbk	4129-2400-0021-4005	Rp 10.000.000,-

(b) Pada perselisihan tersebut pihak kedua telah mengajukan permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di bawah register No.20/PAILIT/1998/PN.Niaga/JKT.PST. yo putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara NO. 07 / PKPU/ 1998 / PN.Niaga / Jkt. Pst. tertanggal 18 Desember 1998.

(c) Bahwa pihak pertama bermaksud untuk melaksanakan kewajiban atas perkara tersebut pada pihak kedua secara tuntas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mengakhiri sengketa, pihak pertama dan pihak kedua bersetuju untuk mengadakan perjanjian perdamaian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 : Pihak kedua dengan ini menyatakan akan membebaskan pihak pertama yang dapat ditagih pihak kedua, apabila pihak pertamatelah membayar utangnya

PASAL 2 : Pihak pertama berkewajiban membayar hutangnya tersebut sebesar Rp 419.500.000,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus rupiah) tunai kepada pihak kedua pada tanggal 24 Pebruari 1999, dengan perincian sesuai bunyi point perjanjian perdamaian ini.

Bahwa apabila pihak pertama tidak melakukan kewajibanya membayar seluruh jumlah hutang yang telah ditentukan seasuai pasal 2 ayat 1 di atas, maka permohonan kepailitan tersebut berjalan sesuai dengan undang-uindang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan.

Bahwa apabila pembayaran yang dilakukan oleh pihak pertama sudah

tuntas dan lunas, maka perjanjian perdamaian ini berakhir secara sah.

PASAL 3 : Dengan dilakukan tindakan seperti apa yang terdapat dalam pasal 2 diatas maka para pihak menyatakan memberikan pembebasan (acquet et de charge) terhadap seluruh perselisihan Hukum tersebut di atas dan menyatakan nmelepaskan hak menuntut pada masing-masing oihak baik saat ini maupun di kemudian hari.

PASAL 4 : Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian perdamaian di bayar oleh pihak pertama.

4) Isi perjanjian perdamaian perkara No. 10 / PKPU /1998 / PN.Niaga/Jkt Pst.<sup>64</sup>

Bahwa rencana damai yang diajukan pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

<sup>64</sup>Periksa *Putusan Pengadilan Niaga* No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Jo No. 21/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 19 Mei 1999.

- (1). Usulan Restrukturisasi Hutang (kecuali kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Indomobil sukses Internasional, Tbk)

Kreditur	Saldo Pokok Pijaman per 23-12-1998	%	Jumlah
Asian Banking Corporation	Rp 121.712.456.173,-	70	Rp 85.198.719.321,-
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.	Rp 30.000.000.000,-	70	Rp 21.000.000.000,-
PT. Bank Bali, Tbk.	Rp 30.800.000.000,-	70	Rp 21.560.000.000,-
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.	Rp 11.145.748.698,-	70	Rp 7.802.024.086,-
Jumlah	Rp 193.658.204.871,-	70	Rp 135.5600743.410,-

Dasar pembagian penyelesaian hutang adalah saldo pokok pinjaman.

- (2) Jumlah kas bersih pada tanggal 1 april 1999 yang tersedia untuk penyelesaian hutang di atas, diestimasikan sebesar Rp 139.000.000.000,- (dapat di

bayar secara tunai dan riil selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah sita jaminan PT. Bank Bali, Tbk diangkat);

Pendapatan bunga deposito atas dana sebesar Rp 135.000.000.000,- sejak tanggal 1 April 1999 sampai dengan pelepasan sita jaminan akan menjadi hak pihak kedua/ kreditur seluruhnya termasuk PT. Bank Rakyat Inonesia dan PT. Bank Sukses Internasional, Tbk;

Pendapatan bunga deposito tersebut akan di bagikan secara proposional berdasarkan saldo pinjaman pokok dari masing-masing kreditur pada tanggal 23 Desember 1998;

- (3) Penyelesaian "Corporate Guarantee" PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk, atas nama pinjaman dari kreditur Sindikasi yang dikoordinasikan oleh Asian Banking Corporation, diusulkan diselesaikan dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- Dana tersebut akan diambil dari bagian penyelesaian pinjaman perusahaan kepada

PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk, sehingga PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, akan menjadi Rp. 12.115.000.000,- (Rp. 17.115.000.000,- - Rp. 5.000.000.000,-) pembayaran akan dilakukan secara tunai dan riil pada saat pembayaran sebesar Rp. 135.000.000.000,- di atas sesuai dengan butir 2;

- (4) Kas diasumsikan Rp. 10.000.000.000,- yang dicadangkan untuk digunakan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perpajakan	Rp.7.500.000.000,-
2.	Jasa Pengurus	Rp.1.500.000.000,-
3.	PHK Karyawan	Rp.1.500.000.000,-
Total		Rp.10.000.000.000,-

- (5) Beban operasi perusahaan diasumsikan sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang akan dibiayai dari hasil "Collection" piutang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 1999, untuk pembayaran biaya pengadilan diluar pengadilan niaga, biaya konsultan, biaya operasi dan keperluan lainnya. Hasil "Collection



ini berasal dari tagihan termasuk tagihan BRI Logsitik;

- (6) Hutang kepada Bank Rakyat Indonesia dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, (sesuai butir tiga) akan diselesaikan dengan "Collection" atas piutang sesuai dengan saldo pokok hutang yang disetujui bersama oleh pihak kedua/para kreditur dan pihak pertama/debitur.;

Kreditur	*r1A Saldo Pokok Pinjaman Per 23 Des 1999
PT. Bank Rakyat Indonesia	Rp.75.910.577.502,-
PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	Rp.12.115.000.000,-
Jumlah	Rp.88.025.577.502,-

"Collection" atas piutang akan dibayarkan pertamanya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, kemudian sisa "Collection" atas piutang, setelah pelunasan hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia akan

dibayarkan kepada PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk;

- (7) Apabila terdapat sisa "Collection" setelah pelunasan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, maka diupayakan oleh perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya (apabila memungkinkan);
- (8) Penyelesaian hutang kepada kedua / kreditur ini bersifat final yang membebaskan perusahaan dari seluruh kewajiban dan jaminan termasuk "Corporate Guarante" PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk yang saat ini dimiliki oleh kreditur sindikasi yang dipimpin oleh Asian Banking Corporation (lihat butir 3);

Data tentang putusan perdamaian lainnya misalnya dalam perkara No. 09/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst dan No.15/PKPU/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst

- (1) Isi Rencana Perjanjian Damai Dalam Perkara No. 09/PKPU/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan akta perdamaian ini ditandatangani utang Debitur (Pemohon PKPU) kepada **Kreditur PT. Bank Finconesia** adalah terdiri dari utang pokok sebesar US\$ 2.500.000,- ditambah bunga tertunggak sebesar Rp. 350.000.000,-
2. Pelunasan terhadap utang pada angka 1 di atas akan dilakukan oleh Debitur dalam jangka waktu 48 bulan termasuk masa tenggal 12 bulan dengan jadwal cicilan sebagai berikut :

No	Bulan/Tahun	Pokok (US\$)	Bunga (US\$)
1.	10 Januari 2000	-	Rp.350.000.000,-
2.	4 Januari 2000	-	Sibor + 2,5% p.a. Dari Oktober 2000
3	4 Januari 2001	100.000	Sibor + 2,5% p.a.
4.	4 April 2001	100.000	Sibor + 2,5% p.a.
5.	4 Juli 2001	100.000	Sibor + 2,5% p.a.
6.	4 Oktober 2001	100.000	Sibor + 2,5% p.a.

7.	4 Januari 2001	262,500	Sibor + 2,5% p.a.
8.	4 April 2001	262,500	Sibor + 2,5% p.a.
9.	4 Juli 2001	262,500	Sibor + 2,5% p.a.
10.	4 Oktober 2001	262,500	Sibor + 2,5% p.a.
11.	4 Januari 2001	262,500	Sibor + 2,5% p.a.
12.	4 April 2001	262,500	Sibor + 2,5% p.a.
13.	4 Juli 2001	262,500	Sibor + 2,5% p.a.
14.	4 Oktober 2001	262,500	Sibor + 2,5% p.a.

3. Jumlah utang Debitur (Pemohon PKPU) kepada Kreditur PT. ASTRIA RAYA BANK Dalam Likuidasi adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
4. Perlunasan atas utang pada angka 3 diatas, akan dilakukan oleh Debitur dalam jangka waktu 36 bulan, termasuk masa tenggang 12 bulan, dengan jadwal cicilan sebagai berikut :

1.	8 Mei 2002	133.333.333,33
2.	8 Juni 2002	133.333.333,33

3.	8 Juli 2002	133.333.333,33
4.	8 Agustus 2002	133.333.333,33
5.	8 September 2002	133.333.333,33
6.	8 Oktober 2002	133.333.333,33
7.	8 Nopember 2002	133.333.333,33
8.	8 Desember 2002	133.333.333,33

5. Pembayaran cicilan sesuai jadwal di atas adalah tunai dan memakai tanda terima yang sah dari Kreditur-Kreditur tersebut diatas;
6. Apabila Pemohon PKPU lalai membayar utangnya sesuai dengan jadwal yang disebut di atas, maka tanpa teguran lagi, pemohon PKPU demi hukum sudah terbukti melanggar perdamaian ini dan sehari sesudah kelalaian ini terjadi, maka Pemohon PKPU menerima putusan kepailitan yang diajukan oleh hakim pengawas pada           Majelis           Perkara           No. 63/PKPU/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst

(2) Isi Perjanjian Perdamaian dalam Perkaran No.

15/PKPU/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst adalah sebagai berikut :

Bahwa rencana perdamaian yang disepakati antara Pemohon (Debitur) dengan para Kreditur untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing Kreditur tersebut telah ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Pembayaran Terhadap Kreditur I

Atas utang sebesar Rp. 209.007.500,- (dua ratus sembilan juta tujuh ribu lima ratus rupiah) akan dibayar Debitur dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai-nilai :

- Rp. 83.603.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Maret 2000;
- Rp. 125.550.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Agustus 2000;

## Pasal 2

### Pembayaran Terhadap Kreditur II

Atas utang sebesar Rp. 354.250.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar Debitur dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai-nilai masing-masing :

- Rp. 141.700.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Maret 2000;
- Rp. 212.550.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Agustus 2000;

## Pasal 3

### Pembayaran Terhadap Kreditur III

Atas utang sebesar Rp. 1.417.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah) akan dibayar Debitur dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai-nilai masing-masing :

- Rp. 566.800.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Maret 2000;
- Rp. 850.200.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Agustus 2000;

#### Pasal 4

##### Pembayaran Terhadap Kreditur IV

Atas utang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayar Debitur dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai-nilai masing-masing :

- Rp. 120.000.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Maret 2000;
- Rp. 180.000.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Agustus 000;



## Pasal 5

### Pembayaran Terhadap Kreditur V

Atas utang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayar Debitur dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai-nilai masing-masing :

- Rp. 30.000.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Maret 2000;
- Rp. 45.000.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Agustus 2000;

## Pasal 6

### Pembayaran Terhadap Kreditur VI

Atas utang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan dibayar Debitur dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai-nilai masing-masing :

- Rp. 18.400.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Maret 2000;
- Rp. 27.600.000,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Agustus 2000;

#### Pasal 7

##### Pembayaran Terhadap Kreditur VII

Atas utang sebesar Rp. 55.730.969,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) akan dibayar Debitur dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, dengan nilai-nilai masing-masing :

- Rp. 22.292.387,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Maret 2000;
- Rp. 33.438.581,- dengan jatuh tempo, tanggal 1 Agustus 2000;

## Pasal 8

### Saksi Atas Kelalaian Debitur

Bahwa walaupun perjanjian perdamaian ini telah mendapat putusan pengesahan dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 9 dari perjanjian ini, namun apabila Debitur lalai memenuhi kewajibannya terhadap Para Kreditur sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh Kreditur atau masing-masing Kreditur terhadap Debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya dapat langsung mengajukan Permohonan Kepailitan ke Pengadilan Niaga;

## Pasal 9

### Pengesahan Pengadilan

Bahwa terhadap Perjanjian Perdamaian ini yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Debitur dan Para Kreditur setelah mendapatkan putusan pengesahan dari Pengadilan yang telah memperoleh putusan pengesahan dari Pengadilan yang telah memperoleh mutlak merupakan

suatu atas hak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Kepailitan terhadap Pihak-pihak yang mengikat dan dalam perjanjian perdamaian ini dan karenanya mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diajukan oleh Kreditur I dan Kreditur II yang terdaftar pada No. 15 / PKPU /1999 / PN.Niaga / Jkt.Pst di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

**b. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU**

Pada umumnya suatu perjanjian dengan ketetapan waktu akan mengatur waktu pelaksanaan prestasi debitur. Ketetapan waktu tersebut adalah, tentang waktu antara ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan prestasinya. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih mewajibkan kepada debiturnya untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana diperjanjikan.

Dalam suatu proses Kepailitan yang diajukan oleh kreditur, pihak debitur diberi hak mengajukan PKPU dengan maksud agar debitur diberi penundaan pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, melalui PKPU

tersebut dapat dicapai perjanjian perdamaian menyangkut beberapa hal antara lain restrukturisasi utang, penundaan pembayaran konversi dan saham dan lain sebagainya.

Dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan pengadilan akan diatur tentang tempo pelaksanaan perjanjian dalam tempo yang telah ditentukan tersebut, pihak debitur harus memenuhi isi perjanjian perdamaian. Tidak melaksanakan perjanjian damai watu yang telah ditentukan dapat berakibat dibataalkannya perjanjian perdamaian dan PKPU berakhir dengan pailit. Dari 4 perkara PKPU yang diteliti memuat tempo pelaksanaan penundaan pembayaran masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Dalam perkara No. 1/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat, perjanjian perdamaian dihomologis (disahkan) pada tanggal 25 Mei 1999. Tempo pelaksanaan isi perjanjian dinyatakan sebagai berikut :  
“ Bahwa pembayaran baik berupa uang tunai atau penyerahan saham, maupun pembayaran berupa TMC sebagaimana diuraikan pada butir IV diatas, akan diselesaikan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah akta perdamaian dihomologis oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”.
- 2). Dalam perkara No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat, Perjanjian perdamaian telah dihomologis pada tanggal 14 Januari 1999. Tempo (waktu) pelaksanaan perjanjian ditentukan dalam 4 termnya, yakni :

- a. Pada tanggal 11 April 1999
- b. Pada tanggal 11 Juli 1999
- c. Pada tanggal 11 Oktober 1999, dan
- d. Pada tanggal 11 Januari 2000

Selain itu mengatur klausula percepatan sebagai berikut : “apabila pemohon PKPU lalai membayar utangnya sesuai jadwal yang disebut pada salah satu bukti 1 sampai dengan 4 tersebut diatas, maka tanpa teguran lagi pemohon PKPU demi Hukum sudah sudah terbukti melanggar perdamaian ini dan sehari sesudah kelalaian itu terjadi, maka pemohon PKPU menerima keputusan Kepailitan....”

- 3). Dalam perkara No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat Perjanjian perdamaian dihomologis pada tanggal 29 Januari 1999, tempo pelaksanaan isi perjanjian dinyatakan sebagai berikut :  
“Pemohon PKPU berkewajiban membayar hutangnya kepada para kreditur pada tanggal 24 Pebruari 1999”.
- 4). Dalam perkara No.10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat Perjanjian perdamaian dihomologis pada tanggal 19 Mei 1999. Tempo pelaksanaan isi perjanjian tidak diatur, karena penyelesaian hutang kepada kreditur ini bersifat final.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan Hasil penelitian di atas, maka dapat dianalisa atau dibahas hal-hal sebaga berikut :

**B.1. Alasan debitur mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah Kepailitan**

**a. Sebagai upaya mencegah kepailitan**

Dalam dunia bisnis, acapkali seorang debitur lalai memenuhi prestasinya, bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, keadaan demikian disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi. Menghadapi wanprestasi dari pihak debitur ini, bagi kreditur terbuka jalan untuk menarik kembali piutangnya dari debitur. Hukum menyediakan sarana berupa cara litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian utang melalui cara non litigasi barangkali tidak merupakan pilihan yang ditentukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam kenyataan sering para pihak menggunakan musyawarah sebagai sarana yang sebenarnya hal tersebut tidak diperjanjikan dalam kontrak. Jika cara-cara musyawarah tidak menyelesaikan sengketa utang, kepada kreditur diberikan hak untuk menyelesaikan

utangnya kepada badan peradilan, baik melalui gugatan di Pengadilan Negeri maupun melalui Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan Kepailitan yang diperutukkan terhadap debiturnya.

Permohonan Kepailitan melalui Pengadilan Negeri diajukan oleh kreditur dengan tujuan debitur dinyatakan pailit dan harta kekayaan debitur dieksekusi massal dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi kepada para krediturnya secara seimbang (*pari passu*), cara ini merupakan penyelesaian utang sekalipun dalam kenyataannya tidak seluruh utang terselesaikan secara penuh.

Menghadapi permohonan kepailitan dari krediturnya, debitur pada waktu yang sama dapat mengajukan penangguhan pembayaran sesuai ketentuan pasal 217 ayat (6) UUK. Penangguhan pembayaran ini sebagai perlawanan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh krediturnya. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh krediturnya. Permohonan penundaan pembayaran dari



debitur tersebut diajukan pada waktu menjawab permohonan kepailitan.

Permohonan penundaan pembayaran dilakukan oleh debitur dengan tujuan debitur diberikan waktu (tempo) oleh Pengadilan Niaga untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitur dalam surat permohonan yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga harus menyertakan daftar pertelaan utang-utang serta nama-nama si berpiutang beserta surat-surat bukti secukupnya.

Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur harus sinkron (sesuai) dengan apa yang di mohon, yaitu berupa pendaan pembayaran. Jadi alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh debitur harus mendukung positemnya.

Guna memberikan gambaran atas alasan-alasan debitur dalam permohonan PKPU yang

diajukan telah diteliti beberapa harus sebagaimana diuraikan diatas. Alasan-alasan pihak debitur dalam pengajuan PKPU tersebut antara lain berisi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PKPU tersebut diajukan oleh debitur yang pada umumnya pengusaha dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan para krediturnya. Jadi sebagai “perlawanan” terhadap permohonan kepailita.
- (2) Pemohon-pemohon PKPU mengakui adanya utang terhadap krediturnya. Hanya jumlahnya masih dipermasalahkan. Sebagai permohonan membenarkan jumlah utangnya tetapi sebagai lainnya menyatakan belum diratifikasi.
- (3) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang ditawarkan pada

seluruh kreditur konkuren. Debitur masih tetap ada bila dilihat dari aset-aset yang dipunyai.

- (4) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sebab usaha pemohon sedang berjalan tidak baik. Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah mengalami depresi. Juga dikemukakan adanya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan pemohon, bila tenaga kerja harus di PHK maka semakin banyak pengangguran dan dampaknya menjadi beban perekonomian negara.
- (5) Para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tanggung waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberi penundaan, pemohon akan segera mengajukan proposal perdamaian.

- (6) Tawaran perdamaian yang akan diajarkan ataupun penawaran konversi utang terhadap saham.

Dari permohonan-permohonan PKPU yang diajukan debitur, secara formil telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang dan hal tersebut layak untuk dipertimbangkan. Umumnya pemohon (debitur) belum mengajukan rencana damai dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada kreditur konkuren, namun hal tersebut masih dapat diajukan pemohon dalam waktu selama penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

Alasan kelangsungan usaha merupakan harapan para debitur dalam permohonan PKPU. Hal itu terutama didasarkan kepada kondisi kesulitan keuangan (usaha) perusahaan dan jika debitur harus dinyatakan pailit maka ia tidak dapat lagi meneruskan usahanya serta banyaknya tenaga kerja yang harus diputus hubungan kerjanya yang tidak mustahil akan

menjadi beban (tekanan) pengangguran yang harus ditanggung negara.

Jadi permohonan PKPU sebagaimana tersebut di atas, maka secara formil dan substansil tidak mengandung cacat yuridis. Secara formil telah memenuhi syarat-syarat layaknya suatu permohonan. Sedangkan secara substansial, alasan-alasan yang dikemukakan untuk penundaan pembayaran mendukung posisinya, yakni agar dikabulkannya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

Pemberian penundaan sementara kewajiban pembayaran utang merupakan kewenangan utang merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan PKPU. Dasar hukum pemberian penundaan sementara diatur dalam pasal 217 ayat (6) UUK dan pasal 214 ayat (2) UUK.

Pasal 217 ayat (6) UUK berbunyi sebagai berikut :

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus lebih dahulu”.

Pasal 214 ayat (2) UUK antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang hakim pengurus dan satu atau lebih pengurus yang bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur”.

Ketentuan pasal 214 ayat (2) UUK menentukan secara imperatif pengadilan harus mengabulkan suatu penundaan sementara. Secara *a contrario* Pengadilan Niaga tidak berwenang menolak permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan dimaksud.

Dari data 10 perkara permohonan PKPU yang diperiksa Pengadilan Niaga, yang seluruhnya dikabulkan permohonan sementara kewajiban pembayaran utang. Dalam putusan Majelis Hakim antara lain dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1). Majelis Hakim menunjuk ketentuan pasal 214 ayat (2) UUK, yakni bahwa dengan diajukannya

permohonan PKPU dan kelanjutan rencana perdamaianya, pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

- 2). Bahwa untuk rencana tersebut pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat;

Dari pengamatan terhadap putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, terlihat bahwa Hakim melakukan “penerapan hukum” terhadap suatu peristiwa konkret. Apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan, khususnya tentang keharusan segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang dimohon debitur. Hakim telah mengimplementasikan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa nyata yang diperiksanya melalui putusannya, hakim telah mentransformasikan ide-ide atau asas Undang-undang

Kepailitan seperti asas sederhana, cepat, adil serta keterbukaan.

Dalam permohonan kepailitan, jika secara bersama-sama diajukan PKPU maka permohonan PKPU harus diputus lebih dahulu. Putus PKPU lebih mendahului daripada pemeriksaan kepailitan. Prioritas terhadap putusan PKPU tersebut untuk lebih memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Dengan demikian perdamaian para pihak menjadi prioritas utama ketimbang mempailitkan debitur yang berakibat debitur dalam keadaan insolvensi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka alasan utama dari debitur mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai upaya mencegah kepailitan, yakni mengadakan tangkisan terhadap penundaan kepailitan yang diajukan oleh krediturnya. Disamping itu, dengan terhindarnya dari kepailitan akan membawa manfaat, antara lain :



Setelah diobservasi atas data permohonan PKPU maka pada pokoknya dapat dinyatakan bahwa permohonan PKPU mempunyai motivasi dan hukum sebagai berikut :

- (1) Sebagai upaya mencegah kepailitan.
- (2) Upaya menyelesaikan utang perusahaan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memberikan waktu atau tempo yang cukup kepada debitur.
- (3) Upaya menjaga eksistensi kegiatan perusahaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan.

Motivasi pencegahan kepailitan ini terdapat perkembangan dalam pasal 222 ayat (2) rencana (draf) Undang-undang kepailitan yang baru, yakin terhadap meditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat ditagih, dapat memaksa agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana

perdamaian yang meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Ketentuan tersebut diatas merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius contituendum*) Perkembangan norma hukum dalam penyelesaian utang-piutang tersebut diatas akan membawa harapan peningkatan penyelesaian utang perusahaan melalui penundaan pembayaran ketimbang mempailitkan debitur.

**b. Debitur tetap dapat melakukan kegiatan usaha**

PKPU pada hakikatnya berbeda dengan kepailitan. Penundaan pembayaran tidak berdasarkan keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak dimaksudkan untuk dilakukan tindakan pemberesan (likuidasi) atas “*boedel*” melainkan didasarkan pada kondisi debitur yang dalam keadaan sulit untuk memenuhi (membayar) utang-utangnya secara penuh, misalnya sebagai akibat perusahaan mengalami kerugian atau terjadi kebakaran pabrik, ataupun resesi ekonomi yang

membawa ketidak-stabilan nilai tukar (kurs) terhadap dollar. Kesulitan debitur yang seperti itu belum lah menjadi indikasi kebangkrutan (kepailitan). Jika debitur diberi tempo (waktu) besar kemungkinan ia akan sanggup (mampu) untuk memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh.

Kesempatan waktu yang diberikan kepada perusahaan tersebut sesuai dengan konsep "*Going*" yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus menjalankan usahanya untuk masa yang tidak tertentu dengan demikian PKPU pada dasarnya adalah suatu keadaan dimana debitur berdasarkan putusan pengadilan diberikan tempo (waktu) yang pasti untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur.

Penundaan sementara ataupun penundaan secara tetap yang diberikan kepada pemohon PKPU dari sisi logika hukum akan membuka kemungkinan bagi debitur membayar utang-utangnya kepada krediturnya. Pasal 212 Undang-undang Kepailitan

antara lain menentukan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah “.....dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

Dalam menyikapi permohonan PKPU, Hakim Pengadilan Niaga akan berpegang kepada ketentuan pasal 212 Undang-undang Kepailitan dengan memberikan penundaan sementara sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil. Dengan demikian pendirian Hakim Pengadilan Niaga memandang setiap permohonan PKPU akan memberikan prospek kepada debitur yakni mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Penilaian tersebut lebih didasarkan kepada pemberian tempo atau waktu ketimbang mempertimbangkan nilai finansial antara utang dan harta kekayaan debitur.

Gambaran pemberian penundaan sementara pembayaran utang sebagaimana telah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang diuraikan dalam putusan No. 01 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jkt. Pst, No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, No. 03 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jkt. Pst, No. 04.a / PKPU / 1 998/ PN. Niaga/Jkt.Pst, No. 06 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jkt.Pst, No. 07/ PKPU / 1998 / PN. Niaga/Jkt.Pst, No. 08 / PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, No. 10/PKPU/1998/ PN. Niaga / Jkt.Pst.

Bertitik tolak alasan-alasan dari debitur dalam mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai upaya mencegah kepailitan, yakni mengadakan tangkisan terhadap penundaan kepailitan yang diajukan oleh krediturnya. Disamping itu, dengan terhindarnya dari kepailitan akan membawa manfaat, antara lain :

1. Debitur tetap melangsungkan usaha, dapat menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

dengan para karyawan, meningkatkan “cash flow” guna membayar utang dan hubungan dengan relasi bisnis tetap terjalin.

Kepailitan bagi debitur adalah akhir dari segala maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian perusahaannya.<sup>65</sup> Dengan depailitnya debitur, maka ia dalam keadaan insolvency, yang juga berarti debitur tidak dapat melanjutkan usaha dan barang tentu tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan tidak akan pernah tercapai. Karena dengan kepailitan, demi hukum debitur telah kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya, untuk mencegah hal tersebut tersedia sarana yuridis melalui PKPU yang akan memungkinkan dibangun kesepakatan damai dan perusahaan (debitur) tetap dapat menjalankan kegiatan usaha.

Perdamaian yang terjadi antara debitur dan

---

<sup>65</sup>Rudi A. Lontoh, Dkk, “*Penyelesaian Utang-Piutang*”, Alumni, Bandung, hal 279-280

para krediturnya dalam rangka PKPU akan memungkinkan pembayaran utang dengan menggunakan pendapatan perusahaan, dan juga tenaga kerja yang bekerja diperusahaan dapat dipertahankan. Dengan kesempatan waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, debitur mempunyai kesempatan untuk merestrukturisasi perusahaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan *cash flow* semakin tinggi nilai “Cash Flow”, maka pembayaran utang semakin terbuka.

Pelunasan utang piutang, diprediksi dari pendapatan perusahaan yang diperoleh dari pendapatan usaha. Sebelum pendapatan itu dipakai untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan itu harus dapat menutup kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan, menutup biaya-biaya perusahaan. Sumber pelunasan utang dari pendapatan perusahaan dalam dunia usaha disebut “first way out”<sup>66</sup> disamping itu

---

<sup>66</sup>Sutan Remy Syahdemin, “Hak Jaminan dan Kepailitan”, Jurnal Hak Bisnis, Vol II 2000, hal. 5

sumber pelunasan alternatif adalah dari penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan karena perusahaan dinyatakan pailit, juga harta kekayaan penjamin serta barang agunan milih pihak ketiga yang lazim disebut "second way out".<sup>67</sup>

Penundaan sementara ataupun penundaan secara tetap yang diberikan kepada pemohon PKPU dari sisi logika hukum akan membuka kemungkinan bagi debitur membayar utang-utangnya kepada krediturnya. Pasal 212 Undang-undang Kepailitan antara lain menentukan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah ".....dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

Dalam pada itu perusahaan yang terhindar dari kepailitan, juga mempunyai keuntungan yaitu tetap terjalinnya hubungan bisnis dengan para

---

<sup>67</sup>*Ibid*



relasinya seperti para pelanggan dan pemasok. Perusahaan tidak jatuh nama baiknya dan memungkinkan perolehan pinjaman (kredit) dari lembaga keuangan.

Kelangsungan usaha dari perusahaan membawa dampak positif bagi hubungan tenaga kerja. Para tenaga kerja tetap dipertahankan guna menjalankan usaha yang secara makro akan membawa kesejahteraan. Barang tentu dengan tetap eksisnya kegiatan perusahaan, tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tetap dipertahankan jadi, dapat menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

**c. Manfaat Waktu, Ekonomi Dan Yuridis**

Bertitik tolak dari data penelitian dapat dinyatakan PKPU mempunyai manfaat baik ditinjau dari segi teoritis maupun empiris, manfaat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**(1) Manfaat (nilai guna) waktu**

Secara yuridis peraturan tentang kepailitan dalam pasal 217 ayat (4) menentukan

jangka waktu penundaan pembayaran secara pasti yaitu 270 hari. Dalam kurun waktu tersebut debitur dan kreditur akan bernegosiasi kembali daam rangka tercapainya kesepakatan perjanjian perdamaian menyangkut penyelesaian utang piutang jika dalam waktu tersebut gagal, debitur demi hukum akan dinyatakan pailit. Secara praktis ketentuan waktu tersebut membawa manfaat terutama kepada krediturnya. Ketentuan waktu 270 hari tersebut barang tentu lebih cepat dibandingkan penggunaan cara gugatan di Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan melalui gugatan di Pengadilan Negeri.

Sedangkan bagi debitur adanya PKPU membawa akibat ia tidak dapat dipaksa untuk membayar utang. Disamping itu, dalam tempo waktu yang ditentukan, ia dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan cash flow yang pada gilirannya akan dapat membayar utang dari penghasilan perusahaan. Penyelesaian

utang yang diambilkan dari perusahaan (first way out) merupakan cara yang baik daripada melalui “second way out” berupa kluidasi harta perusahaan.

(2) Manfaat ekonomi

Permohonan PKPU mempunyai tujuan memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pembayaran utang dan diharapkan tercapainya perdamaian atas permasalahan utang piutang. Disamping itu, debitur terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan usahanya. Keadaan seperti ini secara ekonomi akan membawa manfaat kepada debitur, antara lain.

- a. Debitur dapat menjalankan kegiatan usaha.
- b. Tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
- c. Tidak mengganggu rantai usaha (Chain saw) seperi para pemasok (supplier) dan pelanggan.

Selain itu, perusahaan tersebut tetap akan memberikan kontribusi dalam

pembangunan nasional baik itu melalui pembayaran pajak, sebagai tempat lapangan kerja, maupun kedudukannya sebagai pendorong kegiatan ekonomi.<sup>68</sup>

Sedangkan kepada para krediturnya, piutangnya diharapkan akan dibayar secara penuh dalam tempo waktu penundaan pembayaran. Semakin cepat tempo waktu yang berhasil disepakati membawa konsekuensi semakin cepat pembayaran (penyelesaian) utang, suatu hal yang secara ekonomis menguntungkan krediturnya. Kreditur secara pasti akan memperoleh kembali piutangnya yang berada dalam tangan debitur.

- (3) Manfaat yuridis – yuridis pengembangan hukum dan profesionalisme aparat penegak hukum di bidang kepailitan

Bagi debitur PKPU membawa dampak positif yaitu debitur tetap dalam kemampuan dan terhindar dari “Eksekusi Masal” atas hartanya.

---

<sup>68</sup>Iman Syahputra dan Amin Widjaja Tunggal, *“Undang-undang Perseroan Terbatas di Indonesia”*, Harvarindo, Jakarta, hal. 239.

Disamping itu, secara makro penggunaan norma PKPU dan kepailitan membawa manfaat dalam penggabungan hukum dan profesionalisme penegakan hukum kepailitan.

Perusahaan yang menempuh proses PKPU masih berhak mengurus harta kekayaan meskipun dengan persetujuan pengurus atau pengurus-pengurus. Berbeda dengan debitur yang dinyatakan pailit. Ia dalam keadaan "Insolvency", yang berarti ketidakmampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>69</sup> Selanjutnya harta kekayaan dibagi diantara para krediturnya secara seimbang untuk pengembalian peninjauan (utang).

Secara normatif, pailit diartikan sebagai keadaan debitur yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Pengertian ini disimpulkan dari bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-

---

<sup>69</sup>A. F.Elly Erawati dan S. Badudu, "*Kamus Hukum Ekonomi*", Proyek Elips, 1996, hal. 65.

undang kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :  
 “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang ...”.

Pernyataan pailit terhadap debitur harus melalui “*due process*”, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa diartikan juga sebagai sitaan umum atau seluruh harta debitur. Hal ini terilustrasi dalam pendapat-pendapat para sarjana, seperti Sudargo Gautama, Zainal Asikin, Retno Wulan Sutantio dan E. Suherman yang memberikan pendapat sebagai berikut :

**Sudargo Gautama<sup>69</sup> menyatakan bahwa :**

“.....faillisemen pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan menyeluruh (*algemen beslag*) atas segala harta benda daripada sipailit”.

**Zainal Asikin<sup>70</sup> mengemukakan bahwa :**

“..... dengan kepailitan akan diadakan suatu

---

<sup>69</sup>Sudargo Gautama, “*Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 3.

<sup>70</sup>Zainal Asikin, “*Hukum Kepailitan dan Pemundaan Pembayaran di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 24.

penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada para debitur secara berimbang dan adil ...”

**Retno Wulan Sutantio<sup>71</sup> mengemukakan bahwa :**

“Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim dengan cara penyitaan umum atas seluruh harta debitur, baik yang ada pada waktu penyitaan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan itu, untuk kepentingan semua kreditur....”

**Dalam kaitan ini E. Suherman<sup>72</sup> mengemukakan :**

“pada hakekatnya faillsemen adalah suatu sitaan umum yang bersifat conservatoir dan pihak yagn dinyatakan pailit hilang penguasaan atas harta bendanya”.

Eksekusi massal atas harta kekayaan debitur pada hakekatnya merupakan tujuan dari kepailitan, sehubungan dengan hal tersebut **Sri Redjeki Hartono<sup>73</sup> mengemukakan bahwa :** “Tujuan diadakan lembaga kepailitan adalah untuk memungkinkan suatu eksekusi massal dengan cara penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur”.

Harta kekayaan debitur akan dieksekusi secara massal berkaitan dengan pertanggungjawaban

---

<sup>71</sup>Retno Wulan Sutantio, “*Suatu Tinjauan Terhadap Beberapa Yurisprudensi Mengenai Kepailitan*”, BPHN-Dep.Keh, Jakarta, 1991, hal. 5

<sup>72</sup>E. Suherman, “*Faillissement (Kepailitan)*”, Binacipta, Bandung, 1988, hal. 5

<sup>73</sup>Sri Redjeki Hartono, “*Hukum Kepailitan*”, FH. UNDIP, Semarang, Cer-3 1984, hal. 10.

debitur atas seluruh utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1311 dan 1312 KUHPerdara.

Adanya lembaga kepailitan dapat mencegah penyitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur.

Secara perorangan yang tidak tertutup kemungkinan akan menggunakan cara-cara pemaksaan sekunder (*secondary enforcement system*). Dalam kaitan ini, Sri Redjeki Hartono<sup>74</sup> menegaskan :  
“.... Untuk mencegah sitaan dan eksekusi seorang kreditur atau lebih secara perseorangan atau untuk menghentikannya sama sekali”.

Dengan jalan eksekusi bersama-sama hasil penjualan semua harta kekayaan debitur atau “*boedel pailit*” akan diperuntukkan kepada kreditur secara merata dan proposional.

Sejak peraturan kepailitan (baru) berlaku efektif, perkara - perkara permohonan PKPU telah

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal. 9



banyak diajukan ke Pengadilan Niaga. Apa yang tertuang dalam undang-undang sebagai suatu normatif akan diimplementasikan dalam perkara konkret. Putusan-putusan terhadap perkara konkret akan menambah pengalaman praktik dan pengembangan lembaga hukum itu sendiri.

Gambaran minimnya pengalaman praktik di bidang hukum kepailitan dan penundaan pembayaran antara lain dikemukakan oleh Paulus

**Effendi Lotulung sebagai berikut :**<sup>75</sup> “Pengalaman dalam mengadili kasus-kasus kepailitan di dunia peradilan sangatlah minim dibandingkan dengan kasus-kasus perdata pada umumnya dan itupun terjadi di beberapa pengadilan kota besar”.

**Paulus Effendi Lotulung menyatakan :**<sup>76</sup> “Bahwa pada hakekatnya permasalahan tentang substansi dan proses pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU sudah sejak lama (tahun 1905) namun dalam praktik peraturan tersebut jarang sekali dimanfaatkan oleh para pencari keadilan sehingga sangat sedikit kasus-kasus perkara kepailitan yang diajukan ke pengadilan dengan mendasarkan peraturan tersebut.

Dalam kaitan pengembangan sarana hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada saat ini terdapat suatu keinginan untuk

---

<sup>75</sup>Paulus Effendi Lotulung, “Kendala-kendala Prosedural Dalam Penerapan Undang-undang Kepailitan”, Seminar sehari, Jakarta 14 April 1999, hal. 2

<sup>76</sup>*Ibid.*

memberdayakan lembaga tersebut, yakni dengan dimungkinkannya kreditur mengajukan PKPU. Ketentuan baru tersebut terdapat dalam draf undang-undang kepailitan yang baru. Dalam draf juga memberikan pengertian atas istilah utang yang dalam praktik sempat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Berkaitan dengan penyempurnaan undang-undang kepailitan, dengan tujuan sebagaimana dikemukakan diatas, maka Undang-undang disini dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu didalam masyarakat. Nilai-nilai itu sangatlah penting untuk dipergunakan dalam mencapai tujuan bersama atau pengarahannya sosial. Undang-undang kepailitan dipakai untuk menimbulkan perubahan sosial yaitu penyelesaian sengketa utang secara efektif. Penggunaan Undang-undang untuk perubahan sosial yang nyata, pengarahannya proses sosial ini oleh Schuyt<sup>76</sup> disebut : "Social Engineering".

---

<sup>76</sup>Schuyt, "*Rechtssociologie*", Universitaire Pers Rotterdam, 1971, hal. 51, dalam Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Masyarakat", Angkasa, Bandung, 1979, hal. 118

## **B.2. Tingkat keberhasilan debitur dalam mencegah kepailitan melalui pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)**

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitur atas prakarsanya sendiri maupun sebagai tangkisan terhadap permohonan kepailitan yang diajukan para krediturnya, bahkan terdapat suatu wacana yang memungkinkan debitur mengajukan pemindahan kewajiban debitur mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debiturnya.

Hal-hal yang terjadi dengan adanya penundaan pembayaran secara teoritis antara lain dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu.<sup>77</sup>

- a. Piutang-piutang para kreditur akan dibayar atau dapat dibayar seluruhnya oleh debitur.
- b. Pembayaran piutang kreditur itu dilunasi sebagian melalui pemberesan tahap demi tahap ;
- c. Suatu perdamaian apabila terjadi perdamaian yang

---

<sup>77</sup>Zainal Asikin, *"Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 97.

lazim disebut gerechelijk accord atau dwang accord ;

- d. Pernyataan pailit, apabila tujuan yang hendak dicapai dengan pengunduran pembayaran itu tidak tercapai.

Berdasarkan data penelitian terdapat 4 (empat) kemungkinan tingkat keberhasilan debitur dalam mempergunakan suatu hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam menyelesaikan permasalahan utang yaitu :

- a. Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat tercapainya perjanjian dibawah tangan.
  - b. Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhinya perjanjian perdamaian.
  - c. Debitur pailit sebagai akibat gagal tercapainya perjanjian perdamaian.
  - d. Debitur pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.
- 
- a. Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat tercapainya perjanjian dibawah tangan.**

Dari data di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperoleh fakta perkara PKPU yang akhirnya

menyelesaikan permasalahan utang dengan tercapainya perjanjian dibawah tangan tersebut dapat dilihat dari proses perkara No. 03/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst jo No. 02/PKPU /1998/PN. Niaga/Jkt. PSt. Dan No. 08/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt. Pst jo No. 05/PKPU/1998/PN Niaga/Jkt. Pst.

Perdamaian dibawah tangan dalam perkara PKPU adalah diluar prosedur PKPU, namun hal tersebut dapat menyelesaikan permasalahan utang dari para pihak karena diluar prosedur, maka tidak dapat diketahui kesepakatan apa saja yang telah dicapai. Dalam perkara No. 08/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pencabutan permohonan PKPU dan persyaratan pailit oleh para kreditur lain sehingga dengan demikian perkara permohonan PKPU (No. 05/PKPU/1998/PN Niaga/Jkt. Pst) demikian pula perkara permohonan pernyataan pailit (No. 08) Pailit (1998/PN. Niaga/Jkt.Pst) menjadi tidak lagi mempunyai dasar hukum karena substansinya telah dicabut oleh pemohon, sedangkan

termohon maupun para kreditur lainnya menyetujui pencabutan tersebut, sehingga tidak terdapat alasan untuk melanjutkan pemeriksaan menurut prosedur perundang-undangan (c.q. Undang-undang No, 4 tahun 1998).

Perdamaian dibawah tangan ini dalam di praktik di pengadilan umum memang sering terjadi, yaitu penggugat mencabut gugatan dalma perkara perdatatang hal tersebut disetujui oleh pihak lawannya. Cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebenarnya terjadi di luar “kontrak” (perjanjian) para pihak. Namun hal itu disetujui oleh pihak lainnya, bahkan merupakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, suatu prinsip “win-won solution” terhadap perkara PKPU tahun 1998.

Berdasarkan data penelitian jumlah perkara PKPU yang menyelesaikan sengketa utang piutang sebanyak 2 perkara, sehingga prosentasenya sebesar 20%.

**b. Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhinya perjanjian perdamaian.**

Sebagaimana dalam kepailitan, dalam PKPU debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya dengan memperhatikan syarat pengajuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 250 ayat (1) UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 atau tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 217 ayat (4).”

Dengan demikian rencana perdamaian dapat diajukan sewaktu-waktu selama berlangsungnya penundaan, asalkan jangka waktu tersebut tidak melebihi 270 hari. Walaupun sampai batas waktu tersebut belum tercapai persetujuan rencana perdamaian yang diajukan debitur, maka debitur akan dinyatakan pailit. Sebaliknya apabila rencana perdamaian diterima, maka masih diperlukan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Segera setelah putusan tentang pengesahan perdamaian

tersebut mengikat semua *kreditur konkuren* tanpa kecuali, baik yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian, bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang.

Dari data penelitian terdapat dua perkara yang menyelesaikan utang dengan pengesahan rencana perdamaian, yaitu perkara No. 01/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst dan No. 10/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst.

Dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst, PKPU sementara diberikan kepada pemohon pada tanggal 24 September 1998, dan PKPU secara tetap pada tanggal 28 Oktober 1998. Rencana perdamaian telah diajukan oleh pemohon dalam rapat-rapat kreditan pada tanggal 23 Oktober 1998, 8 Maret 1999, 19 Maret 1999, 14 April 1999 dan 30 April 1999.

Menurut laporan hakim pengawas pada tanggal 17 Mei 1999 telah diadakan pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian. Setelah diadakan voting 13 kreditur setuju atau dan 2 kreditur tidak setuju. Kesimpulannya rencana perdamaian disetujui  $\frac{1}{2}$  kreditur



yang mewakili 2/3 tagihan yang berarti diterima oleh kreditur. Akhirnya Pengadilan Niaga mengesahkan rencana perdamaian menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat seluruh kreditur.

Dalam perkara No. 10/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst, PKPU sementara pada tanggal 23 Desember 1998 diberikan kepada pemohon dan pada tanggal 23 Pebruari 1999 telah diberikan penundaan secara tetap. Menurut laporan Hakim Pengawas pada rapat kreditur tanggal 5 Mei 1999 ternyata rencana damai yang diajukan oleh debitur telah disetujui oleh para kreditur dengan perbandingan suara jo, 78% setuju dan 27,34% tidak setuju, hal ini berarti persyaratan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  dan mewakili 2/3 bagian tagihan telah terpenuhi. Akhirnya Pengadilan Niaga mengadakan perdamaian tertanggal 5 Mei 1999.

Menurut data di Pengadilan Niaga perkara No. 01/PKPU/1998. PN. Niaga/Jkt. Pst dan No. 18/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

**c. Debitur pailit sebagai akibat gagal tercapainya perjanjian perdamaian.**

Dari data penelitian terdapat 4 perkara yang gagal tercapai perdamaian dan status debitur dinyatakan pailit, yaitu perkara No. 03/PKPU/1998/Pn. Niaga/Jkt. Pst, No. 04/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst No. 08/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst, No. 09/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst.

Sekalipun keempat perkara tersebut di atas telah memperoleh penundaan sementara pembayaran utang, tetapi tidak memperoleh penundaan secara tetap. Hal tersebut disebabkan rencana perdamaian belum disetujui atau bahkan tidak diajukan sama sekali oleh debitur. Akhirnya debitur dinyatakan pailit dan terhadap harta kekayaannya dieksekusi massal melalui lelang umum yang hasilnya akan dibagi kepada para krediturnya secara seimbang dan proporsional.

**d. Debitur pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.**

Berdasarkan data penelitian terdapat 2 (dua) perkara PKPU tahun 1998 yang telah mencapai perjanjian perdamaian (penggerakan perdamaian) akan tetapi debitur

wanprestasi, sehingga para krediturnya mengajukan pembatalan perjanjian damai. Konsekuensi yuridis dari pembatalan damai adalah debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Perkara tersebut adalah No. 01/Pembatalan Perdamaian/1999/PN. Niaga/Jkt. Pst dan No. 20/Pailit/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst

Pembatalan perjanjian diajukan oleh pra kreditur. Sedangkan pihak debitur dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan terbuka upaya peminjaman kembali untuk melawan putusan pembatalan perjanjian tersebut.

Dalam perkara PT. Asparindo Permata Lines dalam perusahaan pelayanan angkutan utama, pemohon (debitur) mengajukan upaya hukum kasasi yang terdaftar dalam No. 038/K/N/1999 dengan putusan menolak permohonan kasasi tersebut. Debitur mengajukan peminjaman kembali yang terdapat dalam No. 03/PK/N/2000 yang putusannya pada pokoknya menolak permohonan peminjaman kembali dari pemohon.

### **B.3. Efektivitas PKPU dalam Mencegah Kepailitan**

Berdasarkan data penelitian terdapat 4 (empat) perkara atau 40 % yang berhasil menyelesaikan utang-piutang perusahaan. Menyadari manfaat PKPU yang dapat mencegah kepailitan dan juga manfaat – manfaat lainnya, idealnya persentasenya ditingkatkan. Beberapa faktor diharapkan merupakan solusi dalam peningkatan keberhasilan debitur, sehingga keberadaan lembaga PKPU perlu diefektifkan.

Penundaan-penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) diberikan kepada debitur dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian utang. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para kreditur melalui Pengadilan Niaga akan disahkan dalam suatu putusan setelah memenuhi persyaratan tertentu ada kemungkinan Pengadilan Niaga menolak pengesahan rencana perdamaian, jika :

- a. Harta debitur, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena menggunakan upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal itu.
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminannya untuk pembayarannya.

Jika Pengadilan Niaga mensahkan isi perdamaian yang lazim disebut homologasi, maka debitur berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian damai. Kelalaian debitur dalam melaksanakan perjanjian damai dapat berakibat pembatalan perjanjian yang telah disyahkan, dengan konsekuensi debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dengan demikian isi perjanjian perdamaian dan pelaksanaan perdamaian tersebut merupakan faktor-faktor pendorong penyelesaian utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang yang pada pokoknya mengandung tiga elemen, yaitu :

- a. Kemauan dan kemampuan finansial debitur untuk membayar utang.
- b. Sikap toleransi kreditur terhadap rencana proposal perdamaian.
- c. Tempo waktu pelaksanaan perdamaian.

Faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga debitur terhindar dari kepailitan antara lain sebagai berikut :

- a. **Substansi (isi) Perjanjian Perdamain Dalam PKPU**

Suatu Perjanjian Perdamaian dibuat untuk mengakhiri suatu sengketa dan dalam hal PKPU adalah penyelesaian utang yang telah jatuh tempo

dengan cara-cara antara lain : Restrukturisasi utang pengurangan/potongan pokok pinjaman dan bunganya, pengurangan tingkat suku bunga, konversi utang kepada saham, penundaan pembayaran.

Dalam perkara No. 01 / PKPU / PN. Niaga / Jakarta Pusat. Perjanjian damai antara debitur dan para krediturnya antara lain berisi :

- Konpensasi TMC (Transferable Membership Certificate) Emerald Golf.
- Pembayaran dengan uang tunai.
- Konversi saham.
- Tempo pelaksanaan akan diselesaikan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah akta perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga.

Perkara No. 06 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jakarta Pusat, perjanjian damai yang ditawarkan dan telah dihomologasi antara lain meliputi pembayaran tunai yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap terhitung 11 April 1999 sampai dengan Januari 2000.

Perkara No. 07 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jakarta Pusat, dalam perjanjian damai yang telah dihomologasi antara lain meliputi pembayaran tunai atas seluruh utang dalam tempo (waktu) 27 hari atau kurang dari 1 (satu) bulan.

Perkara No. 10 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jakarta Pusat, dalam perjanjian yang telah di Homologasi antara lain : Rekstrukturisasi utang, pengurangan nilai pinjaman serta bunganya (70%), pemberian bunga deposito dan perjanjian tersebut dinyatakan telah final.

Suatu rencana perdamaian mempunyai kekuatan mengikat manakala telah disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian tersebut ditawarkan oleh pihak debitur kepada para krediturnya. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitur, sedangkan para krediturnya diharapkan melepaskan sebagian tuntutananya, dengan demikian dua kepentingan dikompromikan dan akan



menghasilkan suatu "agreement". Namun demikian posisi para kreditur lebih menentukan ketimbang debitur. Sekalipun kreditur bersedia melepaskan sebagian tuntutan, tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingannya agar tidak dirugikan, jika tawaran dari debitur dianggap tidak sesuai, para kreditur dapat meminta debitur untuk menaikkan nilai pembayaran. Hal ini dapat dilihat dari perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat, yang antara lain memberikan perpanjangan penundaan PKPU selama 2 bulan oleh karena terdapat permintaan para termohon (kreditur) agar jumlah yang ditawarkan dalam rencana perdamaian dapat dinaikan.

Contoh lain dari posisi debitur yang tidak seimbang dalam perjanjian perdamaian adalah dalam perkara No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat, yang menetapkan pembayaran tunai atas seluruh utang tanpa diberi keringan dan dibayar dalam tempo kurang dari 1 (satu) bulan. Jelaslah perjanjian damai

yang demikian akan mempersulit debitur dan wajar apabila dibelakang hari debitur dinyatakan pailit.

Perjanjian damai dalam perkara No. 06 /PKPU/ 1998/ PN.Niaga/ Jakarta Pusat pada dasarnya telah memberikan penundaan pembayaran melalui tahap demi tahap, akan tetapi penundaan pembayaran tersebut bersifat pembayaran tunai, dan dengan tidak dipenuhinya pembayaran tahap pertama pihak kreditur mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang berakibat debitur dinyatakan pailit. Tidak puas dengan putusan pailit tersebut, pemohon PKPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 278 jo Pasal 275 UUK, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pembatalan putusan perdamaian tidak dapat dimintakan pemeriksaan pada tingkat kasasi kecuali kasasi untuk kepentingan undang-undang, dan melalui putusan No. 038/N/1999 tanggal 17 Nopember 1999 permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak, demikian pula melalui putusan peninjauan kembali No.03/PK/N/2000

tanggal 28 Pebruari 2000, Mahkamah Agung tetap menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PKPU (debitur).

Berdasarkan uraian diatas, maka substansi (isi)perjanjian damai berpengaruh terhadap penyelesaian utang dalam PKPU. Suatu perjanjian perdamaian yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan debitur dan para krediturnya relatif dapat diterima dan memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga. Perdamaian yang berisi kompensasi utang, konversi utang kepada saham, restrukturisasi berpengaruh positif terhadap penyelesaian utang daripada pembayaran uang tunai.

**b. Pelaksanaan Perjanjian perdamaian**

Perdamaian yang telah disetujui pemohon PKPU dan termohon serta para krediturnya akan *dihomologasi* oleh Pengadilan Niaga segera setelah putusan perdamaian disahkan, maka perdamaian tersebut mengikta semua kreditur konkuren tanpa

kecuali, dalam putusan tersebut kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Putusan pengesahan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Suatu putusan perdamaian dalam PKPU terutama dibuat dengan maksud untuk mengakhiri sengketa penyelesaian utang antara debitur dan para krediturnya. Jika dilihat dari substansi (isi) perjanjian perdamaian, maka pada dasarnya perjanjian tersebut berisi kewajiban-kewajiban sepihak dari debiturnya. Pokok gilirannya debitur harus melaksanakan isi perjanjian manakala telah jatuh tempo. Pelaksanaan isi perdamaian mengakibatkan penyelesaian utang debitur terhadap para krediturnya dan debitur terhindar dari putusan pailit.

Kegagalan melaksanakan isi perdamaian ataupun sampai batas waktu yang tidak terlaksana berakibat debitur dinyatakan pailit. Debitur harus melaksanakan perjanjian damai apabila ingin terhindar dari putusan pailit. Jika debitur gagal, para

krediturnya akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian.

Suatu perdamaian dapat dibatalkan, pembatalan perdamaian disebabkan pihak debitur lalai dalam melaksanakan isi perdamaian. Dalam proses ini berlaku asas pembuktian terbalik, pihak debitur harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya dalam menghadapi permohonan pembatalan perdamaian. Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah debitur masih diberi kesempatan untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi 1 bulan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) UUK antara lain sebagai berikut : “Hakim adalah leluasa, juga karena dinyatakan jabatan, untuk memberaika kelonggaran kepada siberhutang sampai selambat-lambatnya satu bulan, untuk masih juga memenuhi kewajiban-kewajibannya “

Jadi di dalam perlaksanaan perjanjian perdamaian terdapat dua kemungkinan, pertama isi

perjanjian terlaksana oleh debitur. Kedua debitur gagal atau sampai batas waktu yang ditentukan tidak terlaksana dengan akibat debitur dinyatakan pailit dan berlakulah ketentuan-ketentuan tentang Kepailitan dan akibat hukumnya. Yaitu No. 01 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jkt.Pst. dan No. 10 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jkt.Pst.

Dari data perkara PKPU tahun 1998, 2 (dua) perkara dapat melampaui tahapan pelaksanaan isi perdamaian sehingga debitur terhindar dari Kepailitan, 2 (dua) perkara lainnya yaitu No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. gagal dalam pelaksanaan isi perdamaian yang berakibat dibataalkannya perjanjian damai.

Penyelesaian utang melalui PKPU dalam proses Kepailitan dengan prosentase 20% dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini disebabkan undang-undang Kepailitan bermuara pada Kepailitan debitur. Suatu perkara yang telah diberikan penundaan pembayaran sampai dengan pengesahan perdamaian

dapat dinyatakan pailit oleh salah satu sebab dibawah ini :

- 1). Penundaan kewajiban pembayaran Utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur.
- 2). Rencana perdamaian ditolak oleh kreditur.
- 3). Para kreditur mengajukan pembatalan perjanjian damai.

Undang-undang Kepailitan nampaknya lebih memberi perlindungan kepada kreditur. Dengan dipailitkannya debitur maka harta debitur akan dilikuidasi dan dibagikan secara seimbang kepada para krediturnya, sebaliknya debitur akan menanggung kerugian baik materiil maupun moril. Seharusnya akibat-akibat kepailitan tidak perlu terjadi apabila debitur mempunyai ketaatan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Namun, oleh karena sesuatu hal debitur tidak dapat memnuhi isi perjanjian yang telah disepekati. Bagi kreditur, yang terpenting adalah piutangnya kembali dalam keadaan utuh. Untuk menjembatani kedua kepentingan

tersebut Undang-undang kepailitan memberikan sarana hukum berupa lembaga (institusi) penundaan kewajiban pembayaran utang. Jika dicermati lembaga penundaan pembayaran ini berfungsi untuk :

- 1). Memulihkan kesepakatan yang gagal terlaksana.
- 2). Untuk memberikan jaminan pengembalian piutang para kreditur oleh debiturnya.
- 3). Membangun kesepakatan damai dengan kedudukan "*bargaining*" yang seimbang sesuai prinsip "*Win-win solution*".

Dalam kenyataannya, posisi kreditur lebih superior dalam menentukan "item-item" perjanjian yang berakibat antara debitur dan kreditur gagal mencapai kesepakatan damai, atau perjanjian berhasil disyahkan akan tetapi tidak dilaksanakan dan dibatalkan oleh pengadilan, sehingga pada akhirnya bermuara pada kepailitan debitur. Sekalipun pihak debitur akan mengajukan perlawanan terhadap putusan pembatalan perjanjian damai melalui kasasi, tetapi hal itu sebenarnya hanya cara mengulur waktu



terhadap diberlakukannya akibat hukum dari pernyataan pailit.

Perusahaan yang dijatuhkan putusan pernyataan pailit mempunyai beberapa akibat antara lain :

- 1). Permohonan tidak dapat melangsungkan kegiatan usaha;
- 2). Pemutusan hubungan kerja banyak karyawannya;
- 3). Putusnya rantai usaha (*business chain*) para pemasok barang dan jasa;
- 4). Hilangnya pemasukan pajak-pajak perusahaan terhadap Negara;
- 5). Hilangnya sumber pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan sosial.

Dalam rangka menghindari dampak negatif dari dipailitkannya perusahaan. Perlu ada upaya yang memberikan perlindungan yang seimbang kepada debitur. Sesuai asas kepercayaan dan pembayaran utang melalui *first way out* sebagai upaya terakhir, maka seyogyanya debitur diberi kesempatan oleh

kreditur untuk memasuki program penyehatan perusahaan sebelum diajukan permohonan pailit oleh kreditur.

Sebelumnya kreditur dan debitur akan bernegosiasi dan menghasilkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian damai yang isinya antara lain : 1). Persetujuan kreditur agar debitur disehatkan melalui program penyehatan perusahaan perusahaan. 2). Jika dalam tempo waktu yang disepakati tidak tercapai maka kreditur akan mengajukan permohonan pailit.

Untuk efektifnya dalam perjanjian perdamaian tersebut juga harus memuat jaminan pengembalian pinjaman kepada kreditur-kreditur melalui aset-aset ataupun penghasilan-penghasilan yang dapat dijadikan pembayaran melalui program penyehatan permohonan diharapkan dapat meningkatkan pengembalian pinjaman kepada kreditur-krediturnya. Disamping itu perusahaan (debitur) tetap menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu upaya-upaya

penanganan segera terhadap perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, dan merekomendasikan pembentukan Badan Penyehatan Perusahaan semacam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Berdasarkan data permohonan PKPU yang berakhir dengan kepailitan, nampaknya PKPU sebagai sarana hukum dalam menyelesaikan utang perusahaan tidak berperan optimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus permohonan PKPU yang pada akhirnya berakhir dengan kepailitan. Sesungguhnya penyelesaian utang dengan kepailitan merupakan pengingkaran terhadap azas kepercayaan yang dibangun sejak para pihak mempersiapkan "kontrak". Kreditur percaya bahwa debitur akan membayar kembali utangnya secara utuh dan tepat waktu serta

Dalam pada itu tempo waktu yang diberikan oleh Undang-undang selama 270 hari belum dimanfaatkan oleh para pihak waktu 270 hari adalah lamanya waktu penundaan pembayaran, setelah tempo

waktu 270 hari tersebut pembayaran utang-piutang didasarkan pada isi perjanjian perdamaian. Umumnya dalam praktek waktu 270 hari itu ditafsirkan si debitur harus sudah menyelesaikan pembayaran utang-piutang.

Sedangkan mengenai waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian damai, umumnya kreditur menginginkan tempo yang secepat-cepatnya, sebaliknya debitur memerlukan tempo (waktu) yang cukup, yang dihadapi dua kepentingan tersebut, seyogyanya kreditur diharapkan menyadari kedudukan debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan pada gilirannya mengakomodasi keinginan debitur secara wajar serta memberikan tempo (waktu) yang cukup dalam membayar utang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dipadukan dengan hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan debitur mengajukan penundaan kewajiban pembangunan utang (PKPU) dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-piutang didasarkan kepada tiga hal sebagai berikut : Sebagai upaya mencegah kepailitan, agar debitur tetap dapat melakukan kegiatan usaha dan PKPU mempunyai manfaat (nilai guna) waktu, ekonomis dan yuridis.
  - a. Sebagai upaya mencegah kepailitan permohonan PKPU yang diajukan dengan permohonan kepailitan, maka pemeriksaan PKPU didahulukan dan berdasarkan hukum permohonan kepailitan harus dikesampingkan.
  - b. Agar debitur tetap dapat melakukan kegiatan usaha

Perusahaan yang terhindar dari kepailitan masih mempunyai kemampuan mengurus harta bendanya dan tetap dapat melakukan kegiatan usaha dan meningkatkan "*cash flow*". Perusahaan yang tidak pailit masih memiliki prospek untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang, pada gilirannya utang tersebut akan dibayar melalui pendapatan perusahaan (*first way out*). Di samping itu perusahaan dapat menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawannya, hubungan dengan mitra bisnis tetap terjalin seperti para pemasok dan pelanggan serta membuka kemungkinan investasi baru.

- c. Dalam praktik penggunaan sarana hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) mempunyai manfaat teoritis dan praktis.
- Secara praktis menguntungkan bagi kreditur dan debitur, yaitu dengan dicegahnya kepailitan debitur mempunyai nilai guna waktu dan secara ekonomis lebih hemat.
  - Sedangkan secara yuridis empiris akan membawa perkembangan hukum di bidang kepailitan. Dengan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 secara

praktis membawa perkembangan hukum berupa penerapan hukum (*Rechts Fassing*), pembentukan hukum (*Rechts Vorming*), dan penemuan (*Rechts Vinding*).

2. Secara teoritis dan praktis penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat mencegah kepailitan. Tingkat keberhasilan debitur dalam menggunakan sarana hukum penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga ia terhindar dari kepailitan sebagai akibat tercapainya perjanjian dibawah tangan; debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhi perjanjian perdamaian; Debitur pailit sebagai akibat gagal tercapai perdamaian; dan debitur pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.

Pada tahun 1998 perkara kepailitan yang dimohon dan diputus PKPU sebanyak 10 perkara, dari jumlah tersebut tingkat keberhasilan debitur dalam mencegah kepailitan sebanyak 4 (empat) perkara atau 40 %, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) perkara atau 60 % gagal dan debitur dinyatakan pailit.

3. Faktor-faktor pendorong efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan adalah substansi (isi) perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (*Homologasi*) dan pelaksanaan perjanjian perdamaian.

a. Substansi (isi) perjanjian yang telah dihomologasi melalui Pengadilan Niaga dapat berupa :

- (1) Penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo (*moratorium*).
- (2) Pengurangan / pemotongan pokok pinjaman dan bunganya.
- (3) Pengurangan tingkat suku bunga.
- (4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan, maupun
- (5) Konversi utang kepada saham.

Dalam kenyataannya, isi perjanjian perdamaian sangat ditentukan oleh para krediturnya melalui korum, yang berarti kedudukan kreditur lebih *superior* ketimbang debitur. PKPU akan efektif apabila isi perjanjian perdamaian mencerminkan kehendak dan kemampuan debitur dengan perkataan lain memberikan perlindungan yang seimbang. Pada masa yang akan datang diharapkan penyelesaian utang-



piutang melalui PKPU lebih efektif dengan diterapkannya sarana hukum PKPU yang dimohon oleh kreditur dan bukan sarana hukum kepailitan.

b. Pelaksanaan perjanjian perdamaian

Sangat ditentukan oleh kesungguhan dan kemampuan finansial debitur, disamping faktor-faktor lainnya, seperti : lamanya jangka waktu pelunasan dan sifat perjanjian yang telah final dan melalui konversi utang. Perjanjian perdamaian yang tidak dilaksanakan mempunyai konsekuensi yuridis pembatalan perjanjian dan debitur dinyatakan pailit.

**B. Saran – Saran**

1. Sarana hukum PKPU mempunyai manfaat bagi kreditur dan debitur yang sedang mengalami permasalahan utang-piutang, untuk itu perlu diberdayakan sehingga semakin meningkatkan pengembalian pinjaman dan debitur terhindar dari kepailitan.
2. Merekomendasi ketentuan penggunaan lembaga PKPU yang dimohonkan oleh krediturnya sehingga mempunyai kekuatan yuridis dalam perubahan Undang-undang kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998
- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Alumni, Bandung, 1997
- Amirizal, *Hukum Bisnis*, Jambatan, Jakarta, 1996
- Arif Fakrulloh dan Zudan, Hadi Wuryan, *Hukum Ekonomi*, Karya Aditama, 1997
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Manajerial*, BPFE, Yogyakarta, 1994
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Bagir, Haidar, *Era Baru Manajemen Etis*, Mizan, Bandung, 1995
- Berger, Peter L., *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (terj), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1996
- Berman, Harold J., *Law and Revolution*, Harvard University Press, Cambridge, 1983
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1989
- Budiono, *Ekonomi Micro*, BPFE, Yogyakarta, 1993
- Cannon, Tom, *Corporate Responsibility*, Pitman Publishing, London, 1992
- Chamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

UPT-PUSTAK-UNDIP

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987

\_\_\_\_\_, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S., (Ed), *Handbook of Qualitative Research*, SAGE Publications, London, 1994

Edward de Bono, *Menang Dalam Pertarungan Bisnis*, (terjemahan), Delapratasa, Jakarta, 1995

Faizal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, YA3, Malang, 1990

Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

\_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

\_\_\_\_\_, *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

\_\_\_\_\_, *The Commercial Laws of Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, (terj), Bhratara, Jakarta, 1996

Harahap, M. Yahya, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

\_\_\_\_\_, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

\_\_\_\_\_, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 389

Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung 2000

Hartono, CFG. Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982

Irawan, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta, 1997

Ibrahim, Yacob, *Studi Kelayakan Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Kansil, CST, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985

Kartadjoemena, H.S., *GATT. WTO dan Hasil Urugay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997

Krepts, David M., *A Course in Microeconomics Theory*, Harvester Wheatsheaf, New York, 1990

Kwik Kian Gie, *Ganjang-Ganjing Ekonomi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

Lubis, T.Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996

Paloma, Margareth M., *Sosiologi Kontemporer*, (terj.), Raja Grafindo Persada, 1994

Porter, Michael P., *Competitive Strategy*, Macmillan Publishing Co., Inc., 1980

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Purwosucipto, H.M.N., *Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1982

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980

\_\_\_\_\_, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1979

Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik: Paradigma Teori dan Persepektif Baru*, CIDES, Jakarta, 1996

Remmy Syahdeni, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993

Lontoh, Rudhy A., Dkk., *Penyelesaian Utang-Piutang*, Alumni, Bandung, 2201

Ritzer, G., *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Radjawali Press, Jakarta, 1992

Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Terj. Jakarta, 1996

Rusli, Hadijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Saladin, Djaslim, *Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, Ganeca Exact, Bandung, 1990

Salvatore, Dominick, *Managerial Economic in A Global Economy*, McGraw-Hill, Inc., New York, 1996

Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 1992

\_\_\_\_\_, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Utang*, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung, 1999

Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.3), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Jakarta, 1986

\_\_\_\_\_, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat Rajawali*, Jakarta, 1985

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993

Soemitro, Ronny Hanatijo, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985

\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1988

\_\_\_\_\_, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung, Semarang, 1989

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996

\_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000

Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radjawali Press, Jakarta, 1997

Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja, *Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 1996

Wijaya, Faried, *Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta, 1999

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000

Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Alumni, Bandung, 1983

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992

*Himpunan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan (September s.d Desember 1998)*, Tatanusa, Jakarta, 1999

*Himpunan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan (September s.d Desember 1998)*, Tatanusa, Jakarta, 1999

*Bankruptcy Law of Japan*, EHS Law Bulletin Series, Vol. II, 1991

*Composition Law and Special Composition Law of Japan*, EHS  
Bulletin Series, Vol.II, 1998

*Corporate Reorganization*, EHS Bulletin Series, Vol.II, 1996.



## LAMPIRAN

1. - Putusan No. 02 / PKPU / 1998 / PN. Niaga / Jkt.Pst / Mahkamah Agung RI
  - Putusan No. 016K / N / 1999
2. - Putusan No. 17 / Pailit / 1998 / PN. Niaga / Jkt.Pst. Jo.No. 06 / PKPU / PN. Niaga/ Jkt.Pst.
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 03K / N / 1999.
  - Putusan Peninjauan Kembali (PK) MARI No. 03 PK / N / 2000
3. - Putusan No. 20/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Jo No. 071/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
4. - Putusan No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Jo No 21/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.